



BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016-2021). Laporan ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Komitmen dalam penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, geografis, sisi historis, demografis, kinerja ekonomi, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Pemprov Jambi pada tahun 2019.

Kami sadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang sehingga Jambi TUNTAS yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan itu, LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H. SUDIRMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680109 199203 1 002



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Daerah	1
1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	1
1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi.....	2
1.2.3 Kondisi Ekonomi	6
1.3 Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Visi dan Misi.....	10
2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.1.1 Capaian IKU.....	29
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	118
BAB IV PENUTUP.....	123



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Luas Wilayah Provinsi Jambi	2
Tabel 1.2	Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi.....	3
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota	5
Tabel 1.4	Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota	6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	14
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019	26
Tabel 3-1	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	29
Tabel 3-2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2019.....	29
Tabel 3-3	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	33
Tabel 3-4	Kategori Penilaian SAKIP	34
Tabel 3-5	Tingkat akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2019	36
Tabel 3-6	Realisasi Capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	38
Tabel 3-7	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2019	39
Tabel 3-8	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019	46
Tabel 3-9	Intervensi Gizi Spesifik yang dilaksanakan di Provinsi Jambi Tahun 2019.....	50
Tabel 3-10	Perkembangan Skor Indikator per Variabel Aspek IDI Provinsi Jambi Tahun 2017-2018.....	67
Tabel 3-11	Cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.....	76
Tabel 3-12	Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2019	77
Tabel 3-13	Potensi Geothermal Provinsi Jambi	91
Tabel 3-14	Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi	92
Tabel 3-15	Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci	93
Tabel 3-16	Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2019.....	119
Tabel 3-17	Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja	120



Daftar Gambar

Gambar 1-1	Peta Provinsi Jambi	3
Gambar 1-2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2015 - 2019	6
Gambar 1-3	Inflasi Provinsi Jambi (Kota Jambi) dibanding Nasional Tahun 2015 - 2019.....	7
Gambar 1-4	Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2015-2019.....	8
Gambar 3-1	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	31
Gambar 3-2	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	32
Gambar 3-3	Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta komponen pengungkit dan komponen hasilnya.....	32
Gambar 3-4	Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	35
Gambar 3-5	Perkembangan nilai komponen SAKIP.....	35
Gambar 3-6	Penerimaan hasil audit BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 pada Tahun 2019	37
Gambar 3-7	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2019	40
Gambar 3-8	Capaian IPM sebagai indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan.....	44
Gambar 3-9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi	45
Gambar 3-10	Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2015-2019.....	45
Gambar 3-11	Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019	47
Gambar 3-12	Perbandingan persentase cakupan imunisasi rutin anak 11 bulan tahun 2019 dibanding target (93%)	49
Gambar 3-13	Prevalensi Pendek pada Balita di Provinsi Jambi.....	50
Gambar 3-14	Persentase akreditasi puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2019	52
Gambar 3-15	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2019	53
Gambar 3-16	Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2019	54
Gambar 3-17	Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi Tahun 2015-2020	55
Gambar 3-18	Capaian IDG sebagai indikator sasaran meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	58



Gambar 3-19	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2019	59
Gambar 3-20	Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2019	59
Gambar 3-21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi Tahun 2014-2018.....	60
Gambar 3-22	Capaian Komponen Pembentuk IDG Provinsi Jambi Tahun 2018	61
Gambar 3-23	Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jambi	61
Gambar 3-24	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi sebagai indikator Sasaran terwujudnya Ketertiban Umum Daerah.....	63
Gambar 3-25	Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi	64
Gambar 3-26	Demonstrasi yang terjadi tahun 2019	65
Gambar 3-27	Perkembangan Indeks variabel IDI Provinsi Jambi Tahun 2016-2018.....	66
Gambar 3-28	Capaian Total Factor Productivity sebagai indikator Sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	70
Gambar 3-29	Total Factor Productivity (TFP) Provinsi Jambi	71
Gambar 3-30	Capaian Indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB sebagai indikator sasaran perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	72
Gambar 3-31	Share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi.....	73
Gambar 3-32	Capaian indikator ketersediaan energi sebagai indikator Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan.....	75
Gambar 3-33	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari) Provinsi Jambi Tahun 2015-2019	78
Gambar 3-34	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Provinsi Jambi Tahun 2015-2019	78
Gambar 3-35	Produksi padi Provinsi Jambi menurut Kabupaten-kota Tahun 2019 (ton GKG).....	80
Gambar 3-36	Luas panen, produktivitas dan produksi padi menurut Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi, Tahun 2019	80
Gambar 3-37	Capaian persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap sebagai indikator Sasaran Strategis Meningkatnya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	85
Gambar 3-38	Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi	86
Gambar 3-39	Capaian Rasio Elektrifikasi sebagai indikator Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik.....	91
Gambar 3-40	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional	94



Gambar 3-41	Capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih.....	96
Gambar 3-42	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	97
Gambar 3-43	Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebagai indikator sasaran pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi.....	99
Gambar 3-44	Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	99
Gambar 3-45	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	101
Gambar 3-46	Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional	103
Gambar 3-47	Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2015-2019.....	104
Gambar 3-48	Sebaran Hotspot di Provinsi Jambi Tahun 2019	105
Gambar 3-49	Perkembangan Jumlah Hot spot di Provinsi Jambi.....	105
Gambar 3-50	Luas Lahan dan Hutan terbakar di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	106
Gambar 3-51	Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan	109
Gambar 3-52	Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan nasional.....	110
Gambar 3-53	Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran.....	113
Gambar 3-54	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional (Agustus)	113
Gambar 3-55	Capaian laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.....	116
Gambar 3-56	Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	117



BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah untuk menjamin pemerintahan telah berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sedangkan pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

1.2 Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57 dan 58, penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Provinsi Jambi berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:



- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km² yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km² dan luas lautan 4.445,94 Km² serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km² atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km² dan 5.948 km².

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

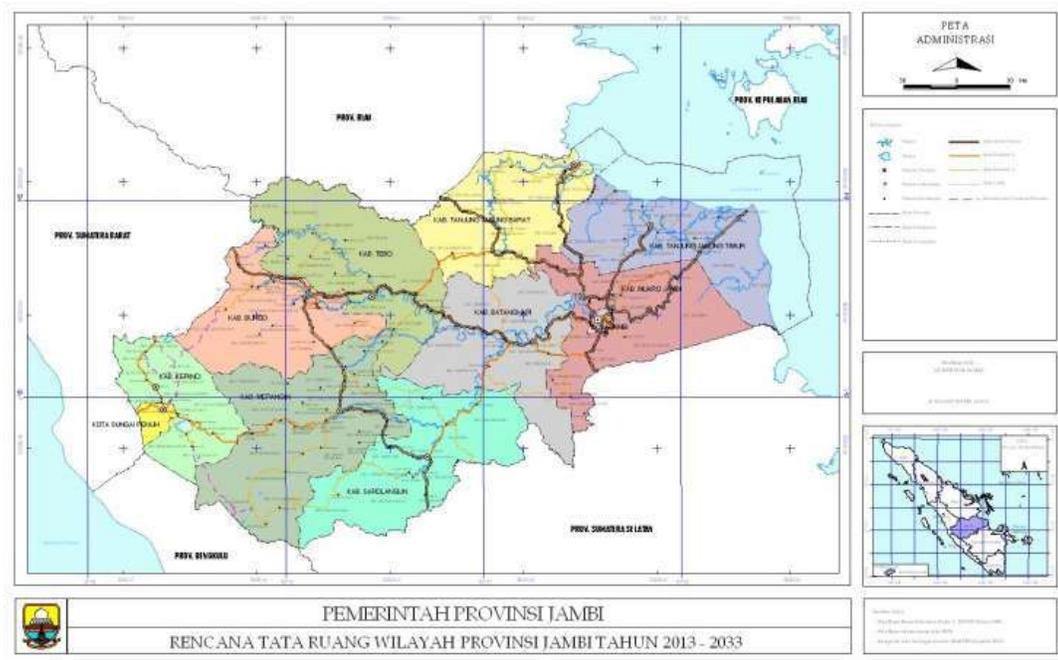
No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	
1	Kerinci	3.334,99	
2	Merangin	7.508,23	
3	Sarolangun	5.948,73	
4	Bungo	4.673,16	
5	Tebo	6.205,81	
6	Batanghari	5.536,86	
7	Muaro Jambi	5.321,67	
8	Tanjung Jabung Barat	Darat	4.990,95
		Laut	384,21
9	Tanjung Jabung Timur	Darat	4.943,36
		Laut	4.061,73
10	Kota Sungai Penuh	353,76	
11	Kota Jambi	172,26	
Jumlah daratan		48.989,98	
Jumlah lautan		4.445,94	
Total		53.435,92	

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1.2.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0^o 74'– 2^o 46,16' Lintang Selatan dan 101^o 12' – 104^o 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan





Gambar 1-1 Peta Provinsi Jambi

Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

1.2.2.2 Topografi

Tabel 1.2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 - 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari Sebagian Sarolangun, Tebo,
Dataran sedang (100 - 500)	903.180	17	sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013



Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

1.2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur
- Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata



Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

1.2.2.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2019 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.624.600 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 72,26 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.943,76 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 232,21 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2019 adalah sebesar 1,72 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,82 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,4 persen.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	234,882	235.800	236.782	237.791	238.700
2	Merangin	366,315	372.200	377.905	383.480	388.900
3	Sarolangun	278,222	284.200	290.231	295.985	301.900
4	Batang Hari	260,631	263.900	266.971	269.966	272.900
5	Muaro Jambi	399,157	410.340	421.179	432.305	443.400
6	Tanjab Timur	213,670	215.320	216.777	218.413	220.000
7	Tanjab Barat	310,914	316.810	322.527	328.343	333.900
8	Tebo	330,962	337.020	343.003	348.760	354.500
9	Bungo	344,100	351.880	359.590	367.182	374.800
10	Kota Jambi	576,067	583.490	591.134	598.103	604.700
11	Sungai Penuh	87,132	87,970	88.918	89.944	90.900
Provinsi Jambi		3,344,421	3,402,052	3.515.017	3.570.272	3.624.600

Sumber: Jambi Dalam Angka 2020, 2020

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 51,73 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan



48,27 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

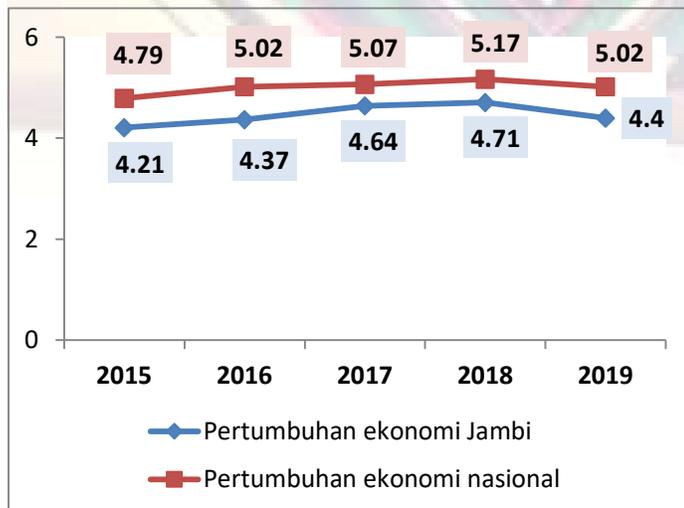
Tabel 1.4
 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kerinci	70.87
2	Merangin	49.94
3	Sarolangun	47.86
4	Batang Hari	46.51
5	Muaro Jambi	81.17
6	Tanjab Timur	40.11
7	Tanjab Barat	70.61
8	Tebo	53.98
9	Bungo	78.81
10	Kota Jambi	2,911.47
11	Sungai Penuh	229.74
Jumlah		71.18

Sumber: Jambi Dalam Angka 2019, 2019

1.2.3 Kondisi Ekonomi

1.2.3.1 Pertumbuhan PDRB



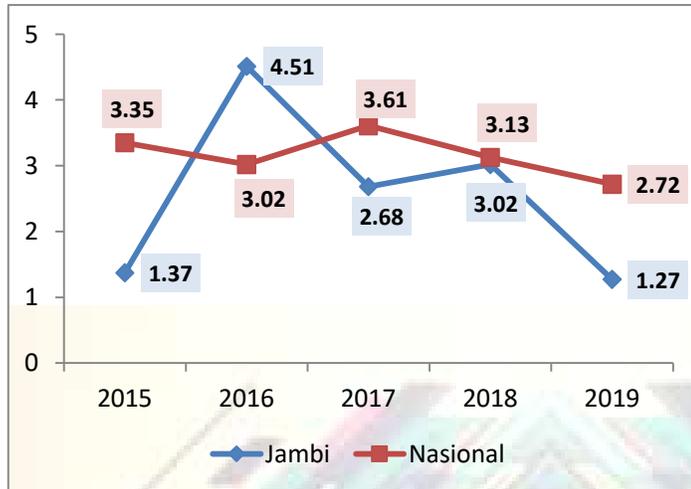
Gambar 1-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2015 - 2019

pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,02 % pada tahun 2019.

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019 adalah sebesar 4,4%, mengalami perlambatan dari tahun 2018 yang bertumbuh sebesar 4,71 %. Pertumbuhan ekonomi ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang juga tumbuh melambat



1.2.3.2 Inflasi



Gambar 1-3 Inflasi Provinsi Jambi (Kota Jambi) dibanding Nasional Tahun 2015 - 2019

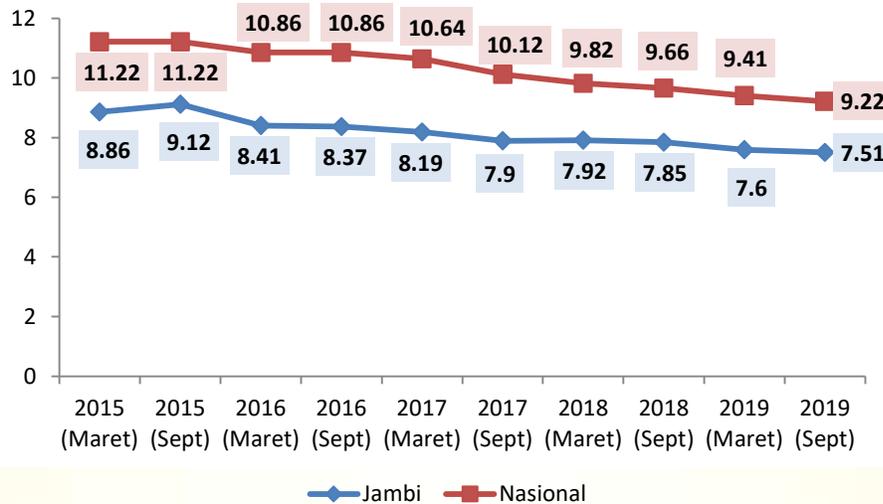
Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi (Kota Jambi) Tahun 2019 adalah 1,27 persen, di bawah tingkat inflasi nasional yang berada pada 2,72 persen. Inflasi ini menurun bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2018 yang berada di angka 3,02. Inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga;

kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok bahan makanan; dan kelompok perumahan, air, listrik, gas.

1.2.3.3 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.





Gambar 1-4 Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2015-2019

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, dalam kurun waktu Maret-September 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi berkurang sebanyak 950 orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2018 jumlah penduduk msiskin mengalami penurunan sebanyak 8.100 orang. Pada periode yang sama (Maret-September 2019), Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebnayak 80 orang dan daerah perdesaan turun sebanyak 1.040 orang.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.** Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, *e-government system* belum optimal dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.** Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing.



Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.

3. Predikat **Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) berwawasan lingkungan belum optimal**. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
8. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs**. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
9. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

- Tertib:** diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul:** Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman:** Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh:** Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil:** mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera:** mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya Misi



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas
- 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan



- 3 Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis
- 4 Mewujudkan ketertiban umum daerah
- 5 Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
- 6 Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan
- 7 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
- 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
- 9 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
6. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
7. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan hukum
9. Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
11. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
12. Meningkatnya ketahanan pangan
13. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
14. Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
15. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
16. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi



17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk



Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik	Mewujud-kan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi awal "CC", dan target capaian akhir "B")	Meningkat-nya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP
					Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan
					Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah
				Meningkat-nya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	IKM
2	MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.	Meningkat-kan kualitas sumberdaya manusia melalui peningka-tan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (kondisi awal 68,24 dan target capaian akhir 71,8)	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
					Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
					Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)



No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
				Meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	Angka Melanjut-kan ke PT Akreditasi B
				Tingkat kelulusan SMA dan SMK	
		Meningkat-kan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis	1. Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) (kondisi awal 0,809 dan target capaian akhir 0,815)	Meningkat-nya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IDG
			2. Indeks kebebasan dari diskriminasi (kondisi awal 96,7 dan target capaian akhir 100)	Meningkat-nya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembang-an seni dan budaya	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni
		Meningkat-nya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan		
3	MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat	Mewujud-kan ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (kondisi awal 70,68 dan target capaian akhir 79,0)	Meningkat-nya stabilitas tibumtran-mas dan hukum	Indeks Aspek Kebebasan Sipil
				Meningkat-nya stabilitas demokrasi di daerah	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi



No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
4	MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan	Meningkat-kan daya saing daerah berbasis IPTEKIN	Nilai Daya Saing (ACI) (Kondisi awal -0,7379 dan target capaian akhir sebesar 0,1)	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)
				Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB
		Meningkat-kan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Petani Tanaman Pangan (Kondisi awal 105,03 dan target capaian akhir sebesar 106,0)	Meningkat-nya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)
				Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300
5	MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkat-kan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum serta pengelolaan energi	Nilai Kompo-nen daya saing infrastruktur dan kualitas hidup (ACI) (Kondisi awal sebesar -0,3915 dan target akhir sebesar 0,1)	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap
					Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi
				Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum



No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
				kebutuhan jaringan irigasi	layak, perkotaan dan pedesaan
					persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Meningkat-kan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kondisi awal sebesar 52,72 dan target capaian akhir sebesar 66,0)	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan
					Persentase Perusahaan minerba yang menerap-kan > 75% syarat <i>good mining practise</i>
					persentase perusahaan proper hijau
					Persentase peningkatan industri ekowisata
					Persentase pengelolaan hutan yang lestari
				Meningkat-nya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar
					persentase penurunan luas lahan kritis
6	MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan	Meningkat-kan kualitas hidup	Indeks kebahagiaan (Kondisi awal 71,1 dan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan



No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
	Masyarakat	masyarakat	target capaian akhir sebesar 72,5)	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka
				Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk



Dari indikator-indikator kinerja tersebut dipilih 15 indikator kinerja utama yang selanjutnya ditetapkan menjadi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi																														
	MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik																																
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integristas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan</p> <p>b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>UNSUR PENILAIAN</th> <th>NILAI MAKSIMAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Peraturan Perundang-undangan</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan dan Penguatan organisasi</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penguatan Akuntabilitas</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </tbody> </table>	NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL	1	Manajemen Perubahan	5,0	2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0	3	Penataan dan Penguatan organisasi	6,0	4	Penataan Tatalaksana	5,0	5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0	6	Penguatan Akuntabilitas	6,0	7	Penguatan Pengawasan	12,0	8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0	JUMLAH		60
NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL																															
1	Manajemen Perubahan	5,0																															
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0																															
3	Penataan dan Penguatan organisasi	6,0																															
4	Penataan Tatalaksana	5,0																															
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0																															
6	Penguatan Akuntabilitas	6,0																															
7	Penguatan Pengawasan	12,0																															
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0																															
JUMLAH		60																															



No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi															
			<p>Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Unsur Penilaian</th> <th>Nilai Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemerintah yang bersih dan bebas KKN</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>40,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Metode pengukuran/penilaian adalah dengan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survey internal dan eksternal.</p>	NO	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal	1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,0	2	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,0	3	Kualitas Pelayanan Publik	10,0	JUMLAH		40,0
NO	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal																
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,0																
2	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,0																
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,0																
JUMLAH		40,0																
<p>MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender</p>																		
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.</p> $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>dimana :</p> <p>$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup</p> <p>$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$(indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$(indeks rata-rata lama sekolah)</p> <p>$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak</p>															
3	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $IDG = \frac{(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})}{3}$ <p>Dimana:</p> <p>I_{par} = Indeks Keterwakilan di parlemen</p> <p>I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan</p> <p>$I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan</p>															
<p>MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat</p>																		
4	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu															



No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: <i>Reviu Media</i> (analisis isi berita surat kabar) dan <i>Reviu Dokumen</i> (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); <i>Wawancara Mendalam</i> (<i>in-depth interview</i>).</p> <p>Terdapat 11 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.</p> <p>Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:</p> <p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Indeks } (X_{ijk}) = \sum \left(\frac{X_{ijk} - X_{\text{terburuk}}}{X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}}} \right)$ <p>Di mana:</p> <p>X_{ijk} : Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k.</p> <p>K_{ideal} : Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}.</p> <p>X_{terburuk}: Tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}</p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 1$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan</p>



No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 100$.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{ideal} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal} > 0$. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:</p> $I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk}) \times 100\% \pm 10$ <p>Di mana: $I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing- masing variabel. Indeks variabel merupakan rata- rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(V_{ij}) = \sum_k^n = 1 P_{ijk} I(X_{ijk})$ <p>Di mana: $I(V_{ik})$:Indeks variabel ke j dari aspek ke i. P_{ijk} :Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j</p>



No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>dan aspek ke i.</p> <p>(X_{ijk}) : Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:</p> $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(A_i)$: Indeks aspek ke i.</p> <p>P_{ij} : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p>
<p>MISI 4: Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</p>			
5	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	$A = \frac{Y}{K^\alpha L^\beta}$ <p>Dengan</p> <p>A = Total Factor Productivity</p> <p>Y = total produksi (output yang dihasilkan)</p> <p>K = input kapital</p> <p>L = input tenaga kerja</p> <p>α, β = konstanta (elastisitas input) dari kapital dan tenaga kerja</p>
6	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	$\frac{S_{st}}{PDRB} \times 100\%$ <p>dengan:</p> <p>S_{st} = besarnya <i>share</i> sektor sekunder terhadap PDRB pada tahun t</p> <p>PDRB = Total PDRB pada tahun t</p>
7	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	$KSPe = \frac{KTSP}{(\Sigma P \times 365 \text{ hari}) \times \text{Kand. e}}$ <p>Dimana:</p> <p>KSPe = Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)</p> <p>KTSP = Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun)</p> <p>ΣP = Jumlah Penduduk (jiwa)</p> <p>Kand. e = Kandungan energi</p>
<p>MISI 5: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>			



No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
8	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	<p>Jalan Prov. Dalam kondisi mantap = $\frac{J_{baik}+J_{sedang}}{J} \times 100\%$</p> <p>Dimana: J_{baik} = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi baik (km) J_{sedang} = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi sedang (km) J = Total panjang jalan kewenangan Provinsi</p>
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	<p>$Rasio\ Elektrifikasi = \frac{\sum RT_L}{\sum RT} \times 100\%$</p> <p>$RT_L$ = Jumlah rumah tangga dengan listrik RT = Jumlah rumah tangga</p>
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	<p>Cara perhitungan: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $P\ AML = \frac{JRTML}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan: P AML: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. JRTML: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak). JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p>
		persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$= \frac{JI_{baik}}{JI} \times 100\%$ <p>JI_{baik} = panjang jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik (km) JI = total panjang jaringan irigasi provinsi (km)</p>



No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH\ Prov = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Keterangan: IKLH Prov = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi IKA = Indeks Kualitas Air Prov IKU = Indeks Kualitas Udara Prov IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Dimana:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$ <p>Keterangan: PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/L_{ij}, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1)\right)$ <p>Keterangan : I_{EU} = Standar kualitas udara berdasarkan EU Directives, dimana I_{EU} > 1 berarti kualitas udara melebihi standar EU dan sebaliknya</p> $IKTL = 0,23\ ITH + 0,24\ IPH + 0,30\ IKT + 0,15\ IKBA + 0,08\ IKH$ <p>Keterangan: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan ITH = Indeks Tutupan Lahan IPH = Indeks <i>Performance</i> Hutan IKT = Indeks Kondisi Tutupan Hutan IKBA = Indeks Konservasi Badan Air IKH = Indeks Kondisi Habitat</p>
	MISI 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat		
12	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dengan: P₀ = Persentase penduduk miskin (head count index) Z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y_i < z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis</p>



No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			kemiskinan $n =$ jumlah penduduk
13	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ Keterangan: r = laju pertumbuhan penduduk P _t = jumlah penduduk pada tahun t P ₀ = jumlah penduduk pada tahun dasar t = jangka waktu

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	71
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	65
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	76
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,3
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	21%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.213
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	78,93
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	94
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	70%
		persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80%
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,5
12.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,7%
13.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,2%
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,98



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3

3.1 Capaian Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi pada perubahan yang lebih baik, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai rumusan perubahan baik pada keluaran maupun dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good government* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai pengejawantahan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah faktor kunci untuk mendorong pelebagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam hal ini aturan perundangan-undangan yang dipakai sebagai pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd dengan tingkatan sebagai berikut:



Tabel 3-1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - \geq 100	Sangat Tinggi	
2	76 - 90	Tinggi	
3	66 - 75	Sedang	
4	51 - 65	Rendah	
5	\leq 50	Sangat Rendah	

3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pencapaian IKU Gubernur Jambi sampai dengan tahun 2019 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2019

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2019			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	100	B	100
2	Indeks Pembangunan Manusia	68,24	71	71,26	100,037	71,8	99,25
3	IDG	61.93	65	67,78	104,1	67,01	101,14
4	Indeks Demokrasi Indonesia	70,68	76	68,71*	89,39	79	85,024
5	Total Factor Productivity (TFP)	NA	1,3	4,08	313,85	1,5	272,00
6	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38%	21,00%	17,77%	84,62%	22,00%	80,77%
7	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.213	3.047	94,83	3.217	94,72



No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2019			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
8	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	75,56%	78,07%	77,93%	99,82%	79,54%	97,97%
9	Rasio Elektrifikasi	81,5	94	99,89	106,27	96	104,05
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75%	70%	66,66%	95,23%	80%	83,33%
11	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35	80,00	73,3	91,63	91	80,55
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	64,5	71*	110,08	66	107,58
13	Angka Kemiskinan	9,12%	7,70%	7,51%	101,32	7,4	97,37
14	Tingkat pengangguran Terbuka	4,20%	3,20%	4,19%	65,31%	2,80%	57,15%
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	1,98	1,55*	127,94	1,82	117,6

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 8 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1, maka 12 indikator (80,0%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator (13,33%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (6,67%) terealisasi rendah. Sehingga bila dihitung rata-rata keseluruhan IKU telah tercapai 89,55% dari target tahun 2019 atau 84,16% dari target akhir RPJMD atau masuk dalam kriteria capaian tinggi.



Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2019 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-1 Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk subbab ini disajikan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

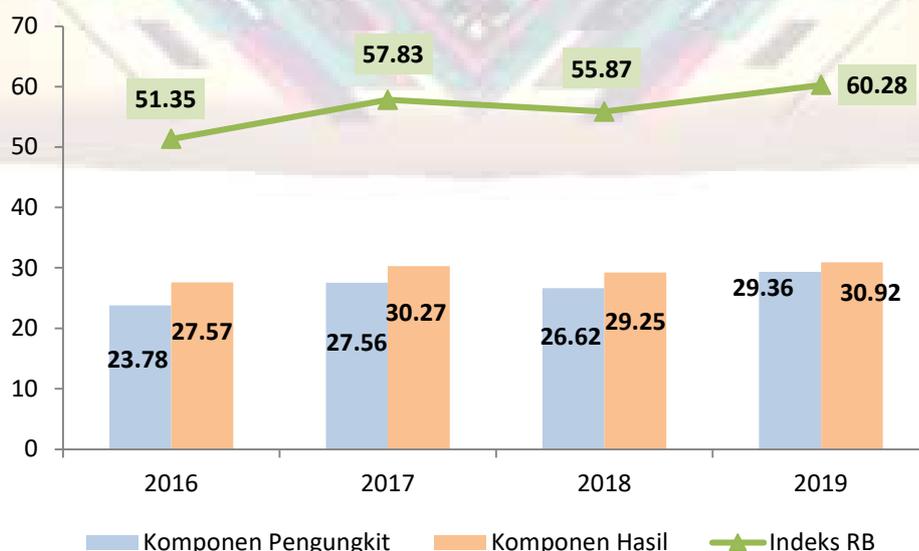


Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 3-2 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3-3 Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta komponen pengungkit dan komponen hasilnya.

Sumber:Kemenpan RB, 2019



Berdasarkan komponen pengungkit penilaian capaian tersebut, hampir seluruh komponen mengalami perbaikan nilai, kecuali adalah komponen penataan tata laksana, komponen penataan sistem manajemen SDM, dan komponen penguatan akuntabilitas. Sedangkan komponen pengungkit lainnya mengalami sedikit penurunan. Secara detail perubahan nilai per komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-3 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,79	2,27
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5,00	1,35	1,35
3	Penataan dan penguatan organisasi	6,00	2,66	2,96
4	Penataan tatalaksana	5,00	2,08	2,44
5	Penataan sistem manajemen SDM	15,00	11,05	11,29
6	Penguatan akuntabilitas	6,00	3,30	3,65
7	Penguatan pengawasan	12,00	1,65	2,35
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6,00	2,74	3,05
	Total Komponen pengungkit (A)	60,00	26,62	29,36
II	Komponen Hasil			
	Nilai akuntabilitas kinerja	14,00	8,40	8,40
	Survei internal integritas organisasi	6,00	3,89	4,42
	Survei eksternal persepsi korupsi	7,00	5,76	6,32
	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
	Survei eksternal Pelayanan publik	10,00	8,20	8,78
	Total komponen hasil (B)	40,00	29,25	30,92
	Indeks reformasi birokrasi (A+B)	100,00	55,87	60,26

Sumber: Kemenpan, 2019

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pengelolaan kearsipan dapat dilihat hasilnya dari hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian cukup baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat peningkatan jumlah unit yang diajukan oleh Provinsi Jambi.

Dalam rangka peningkatan nilai penataan dan penguatan organisasi adalah penataan struktur organisasi dan tata laksana terus disempurnakan setiap tahun untuk mencapai struktur ideal yang diinginkan. Dalam rangka penguatan komponen penataan



sistem manajemen SDM, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jambi untuk keempat kalinya telah melaksanakan seleksi jabatan tinggi pratama untuk pengisian beberapa jabatan eselon II yang masih kosong sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk membangun sistem rekrutmen yang kompetitif. Jabatan eselon II hasil seleksi tersebut adalah kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi serta Direktur Utama RSUD raden Mattaher.

Sementara itu, pada komponen penguatan akuntabilitas, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan beberapa perbaikan pada seluruh komponen SAKIP. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal "B" atau "Baik".

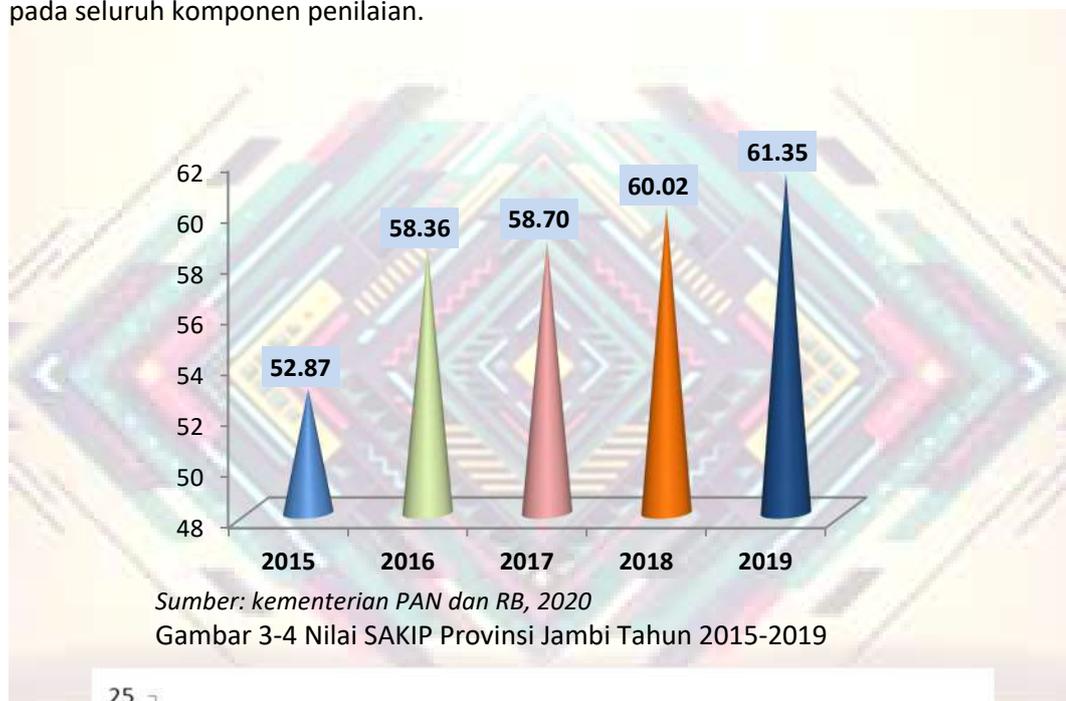
Tabel 3-4 Kategori Penilaian SAKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-30	Kurang

Sumber: Perpres Nomor 29 Tahun 2014



Perbaikan komponen akuntabilitas kinerja menghasilkan capaian yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari 60,02 pada tahun 2018 menjadi 61,35 pada tahun 2019 atau masih dalam kategori B. Bila dibandingkan dengan target, dimana target pada tahun 2019 adalah B, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2019 ini mencapai 87,63% atau masuk dalam kategori tinggi. Bila melihat tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian.



Gambar 3-5 Perkembangan nilai komponen SAKIP



Tabel 3-5 Tingkat akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2019

No	Komponen yang dinilai	2017	2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	19,29	19,84	19,94
b.	Pengukuran Kinerja	12,67	12,95	13,33
c.	Pelaporan Kinerja	9,37	9,76	9,76
d.	Evaluasi Internal	5,52	5,56	5,57
e.	Capaian Kinerja	11,85	11,91	12,75
Nilai Hasil Evaluasi		58,70	60,02	61,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B

Sumber: Kemenpan RB, 2020

Dalam rangka perbaikan komponen perencanaan kinerja, selain telah melakukan perubahan atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diikuti oleh perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan melibatkan seluruh pimpinan di level Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk membuat cascading penetapan kinerja sampai dengan eselon IV sehingga diharapkan seluruh komponen secara berjenjang memiliki kinerja yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran daerah. Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja juga mengalami perbaikan dan didukung oleh capaian kinerja yang secara umum menunjukkan capaian yang tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya. Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk ketujuh kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara



objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.



Gambar 3-6 Penerimaan hasil audit BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 pada Tahun 2019

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi. Sebagai catatan, realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2019. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2019, masih dalam proses ketika laporan ini disusun.



Tabel 3-6 Realisasi Capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2019
	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017	2018	2019				
					Target	Realisasi	% capaian		
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber: BPK, 2019

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang



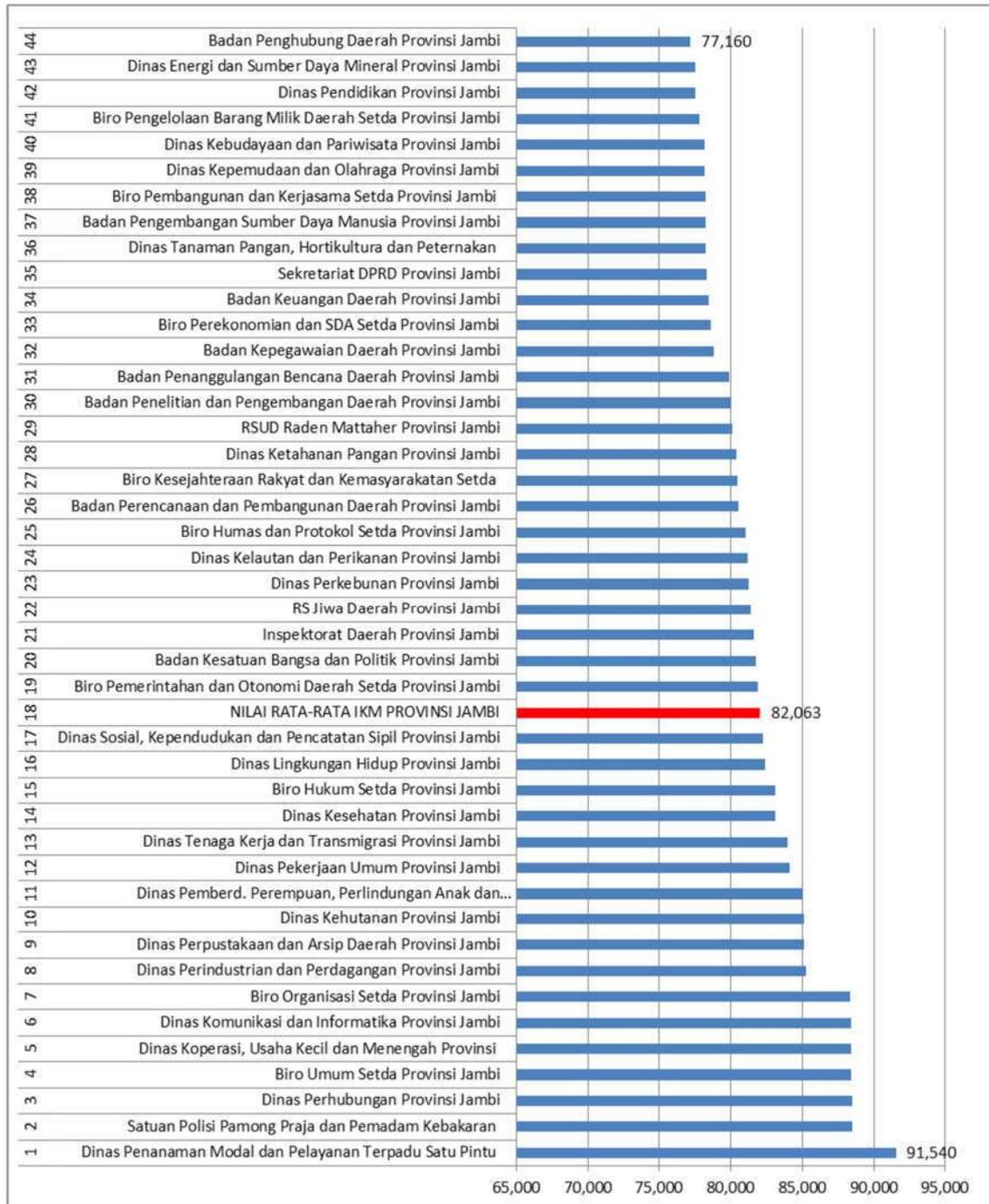
diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kesembilan unsur yang ada dalam survei dapat dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Tabel 3-7 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2019

Unsur Pelayanan	2017	2018	2019
<i>U1: Persyaratan pelayanan</i>	78,07	81,713	83,862
<i>U2: Prosedur pelayanan</i>	78,14	81,390	82,776
<i>U3: Waktu pelayanan</i>	76,53	78,860	81,326
<i>U4: Biaya/tarif pelayanan</i>	78,88	82,229	83,006
<i>U5: Produk/hasil pelayanan</i>	78,11	79,931	81,742
<i>U6: Kemampuan petugas pelayanan</i>	80,43	80,763	82,070
<i>U7: Perilaku petugas pelayanan</i>	81,03	81,858	82,480
<i>U8: Maklumat pelayanan</i>	76,77	78,916	80,961
<i>U9: Mekanisme pengaduan pelayanan</i>	75,75	79,775	80,382
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,19	80,604	82,063

Sumber: Biro Organisasi, 2019





Gambar 3-7 Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2019

Sumber: Biro Organisasi, 2019



Pada tahun 2019, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah “B” atau “Baik” dengan nilai rata-rata 82,063. Hal ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh unsur pelayanan. Unsur dengan nilai tertinggi adalah persyaratan pelayanan dan terendah adalah penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- c. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya
- d. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- e. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi
- f. Program penataan batas dan wilayah administrasi
- g. Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip
- h. Program Pengembangan kearsipan
- i. Program Profesionalisasi PNS
- j. Program Manajemen pelayanan kediklatan
- k. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
- l. Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
- m. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS
- n. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- o. Program penelitian dan pengembangan
- p. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi



- q. Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi
- r. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- s. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
- t. Program pembangunan, pengembangan aplikasi dan telematika
- u. Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
- v. Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca
- w. Program Reformasi Birokrasi
- x. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Permasalahan:

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi.
2. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi:

1. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
2. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
3. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
4. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah



5. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas



Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Demikian pula pendidikan, sebagai salah satu hak asasi manusia maka setiap warga negara berhak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi



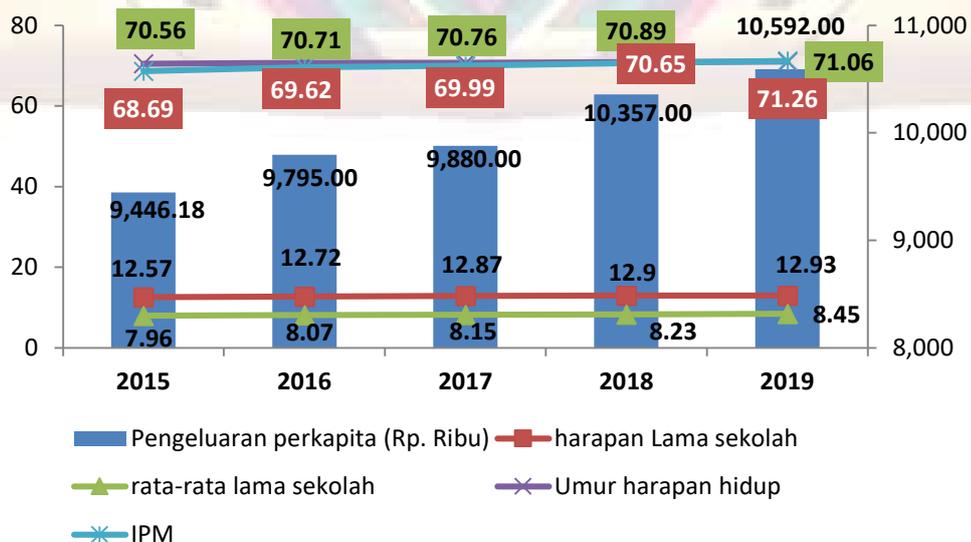
era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 71,26 atau melebihi target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 71,00.



Gambar 3-8 capaian IPM sebagai indikator Sasaran Strategis Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan

Bila melihat capaian IPM Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Data yang dirilis tahun 2019 menunjukkan peningkatan IPM sebesar 0,61 dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,65 menjadi 71,26 atau meningkat 0,86%. Realisasi ini melebihi target tahun 2019 yaitu 71,0 atau terealisasi sebesar 100,37%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan tahun 2019 kinerja indikator IPM telah tercapai sebesar 99,25%.



Sumber: BPS, 2019



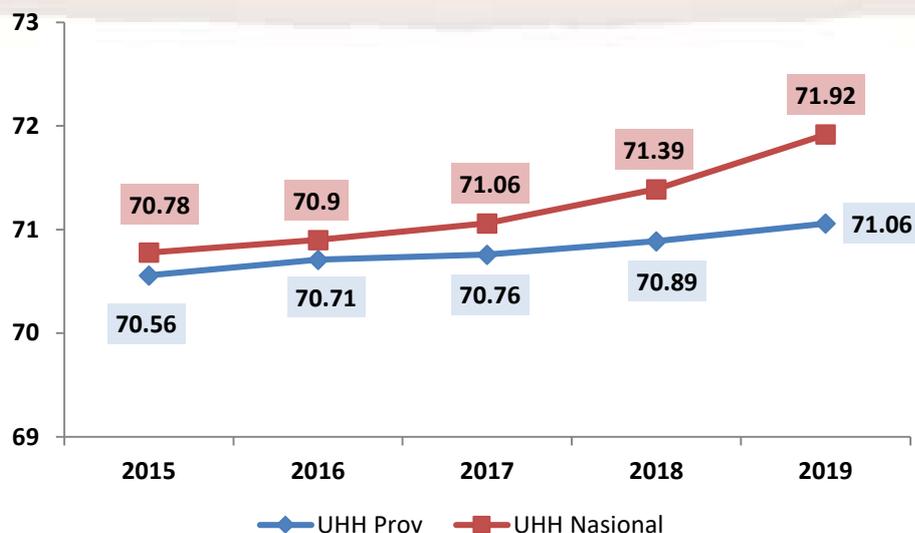
Gambar 3-9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Bila dilihat per-dimensi, seluruh dimensi mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan persentase peningkatan terbesar pada rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 2,67% dan peningkatan terkecil pada Harapan lama Sekolah (HLS) yaitu sebesar 0,23%.

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup menjadi salah satu penanda penting keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di suatu daerah.

Peningkatan Usia Harapan Hidup Provinsi dibandingkan nasional selama kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Bila melihat capaian usia harapan hidup Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan yang cukup menggembirakan, walaupun masih dibawah nasional. Data tahun 2019 menunjukkan peningkatan usia harapan hidup sebesar 0,17 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,89 tahun menjadi 71,06 tahun atau meningkat 0,24%.



Sumber: BPS, 2019

Gambar 3-10 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2015-2019



Tingkat keberhasilan peningkatan usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. atau angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab-sebab lain.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan SDKI tahun 2012, AKI Provinsi Jambi adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami perbaikan yang signifikan pada data Supas Tahun 2015 dan SDKI 2015, dimana AKI menurun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup atau telah terjadi peningkatan kinerja penurunan AKI sebesar 15,04 persen. Untuk mengetahui data tahunan, maka yang digunakan adalah jumlah kematian ibu.

Tabel 3-8 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

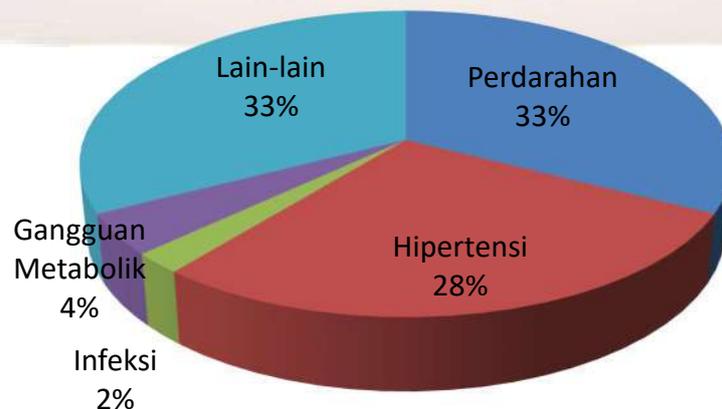
NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	6	6	4	5	4
2	Merangin	10	6	5	5	9
3	Sarolangun	3	5	4	4	4



4	Batang Hari	4	2	8	3	7
5	Bungo	8	10	5	12	9
6	Tebo	2	9	4	3	10
7	Muaro Jambi	6	3	5	2	4
8	Tanjab Barat	3	5	7	4	5
9	Tanjab Timur	5	8	6	4	2
10	Kota Jambi	7	3	4	2	5
11	Kota Sei Penuh	2	2	2	2	0
Provinsi		56	59	54	46	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2019. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2020, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebanyak 59 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Tebo dengan 10 kasus, sedangkan yang paling baik adalah pada Kota Sungai Penuh dengan 0 kasus. Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Gambar 3-11 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019



Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2019, jenis terbanyak adalah perdarahan dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga. Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

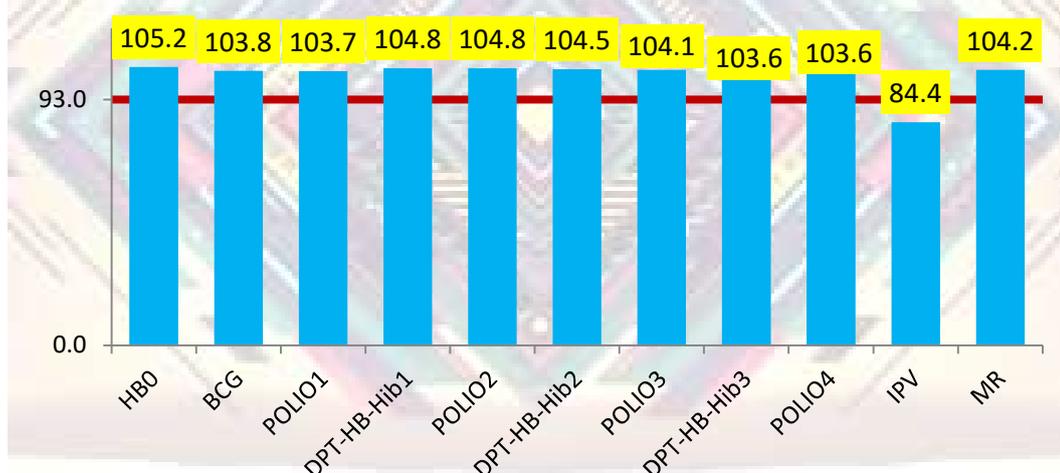
Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi yang digunakan adalah data SDKI yang dirilis setiap 5 tahun sekali, dan data terakhir yang dirilis adalah hasil SDKI 2017 yang baru saja dirilis. Berdasarkan data SDKI 2017, terlihat bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan AKB di Provinsi Jambi dari 34 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Penurunan ini cukup menggembirakan dan menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka tersebut.

Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan



PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal EmergenSI Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11 diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ketinggian desa/kelurahan (UCI Desa).



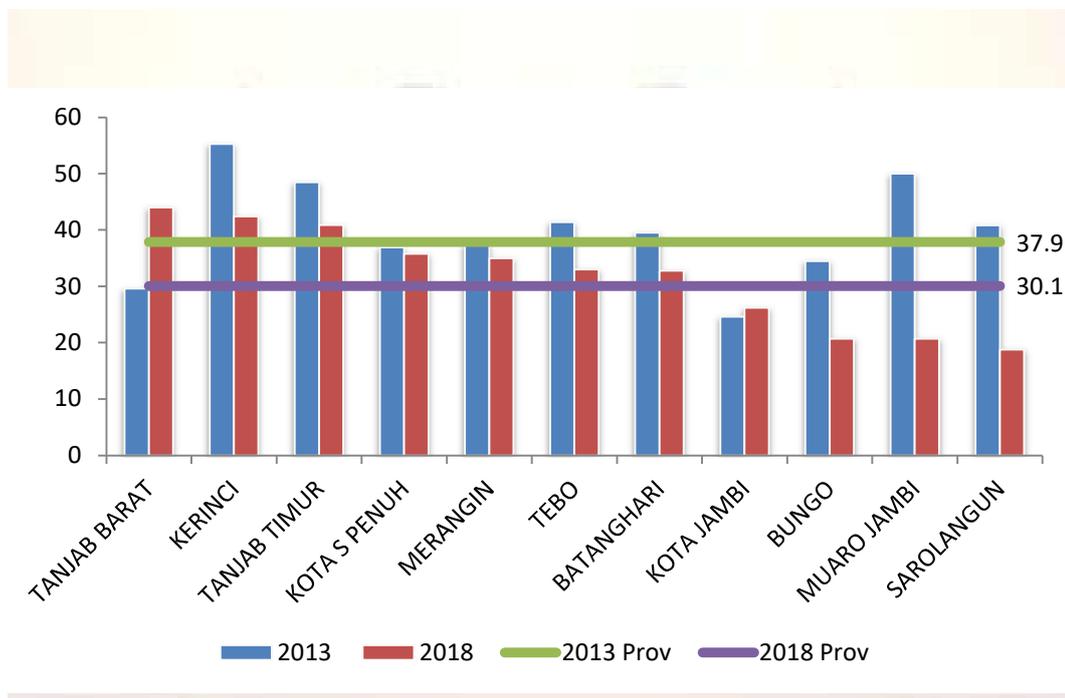
Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Gambar 3-12 perbandingan persentase cakupan imunisasi rutin anak 11 bulan tahun 2019 dibanding target (93%)

Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jambi antara lain melaksanakan perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.



Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi pendek pada balita mencapai 37,9 persen. Setelah dilaksanakan upaya-upaya penurunan prevalensi tersebut, maka telah terjadi penurunan terhadap Prevalensi pendek pada anak balita menjadi 30,7 persen pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Hal ini membuktikan bahwa telah berhasil menurunkan prevalensi sebesar 19 persen dalam kurun 5 tahun tersebut. Bila dilihat per kabupaten/ kota, terlihat bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki prevalensi tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada urutan 2 dan 3. Sedangkan Kabupaten dengan prevalensi terendah adalah Kabupaten Sarolangun.



Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, Dinkes, 2020

Gambar 3-13 Prevalensi Pendek pada Balita di Provinsi Jambi

Tabel 3-9 Intervensi Gizi Spesifik yang dilaksanakan di Provinsi Jambi Tahun 2019



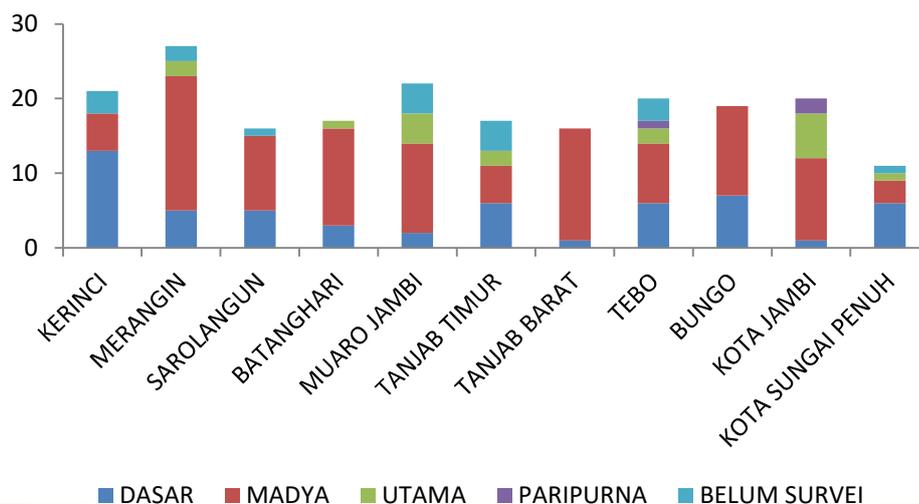
No	KABUPATEN / KOTA	INDIKATOR GIZI								
		Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT			Persentase Balita Kurus yang mendapat PMT			Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah 90 tablet selama		
		Sasaran	Absolut	%	Sasaran	Absolut	%	Sasaran	Absolut	%
1	KERINCI	483	483	100	1.285	1.285	100	4.209	3.638	86,4
2	KOTA S.PENUH	85	85	100	10	10	100	1.615	1.584	98,1
3	MERANGIN	1.057	889	84,1	2.693	2.069	76,8	8.017	7.227	90,1
4	SAROLANGUN	361	361	100	680	680	100	7.084	6.482	91,5
5	BATANG HARI	484	484	100	3.230	3.230	100	5.689	5.456	95,9
6	MUARO JAMBI	333	309	92,8	149	149	100	10.825	10.120	93,5
7	TANJAB TIMUR	286	276	96,5	673	673	100	4.264	3.507	82,2
8	TANJAB BARAT	647	632	97,7	721	697	96,7	7.096	6.678	94,1
9	TEBO	1.452	1.054	72,6	734	734	100	7.404	6.620	89,4
10	BUNGO	49	49	100	3	3	100	8.736	7.682	87,9
11	KOTA JAMBI	752	689	91,6	269	257	95,5	11.613	11.085	95,5
	PROVINSI	5.989	5.311	88,7	10.447	9.787	93,7	76.552	70.079	91,5

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2020

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Bentuk intervensi yang diberikan antara lain adalah pemberian suplemen kepada ibu hamil, pemberian asi eksklusif, pemantauan pertumbuhan bayi dan balita serta pemberian suplemen vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun. Khusus pada balita yang tergolong kurus, semua atau 100% telah mendapat makanan tambahan di provinsi Jambi pada tahun 2019.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan secara umum di Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong kabupaten/ kota untuk memiliki puskesmas terakreditasi. Dari 206 puskesmas yang ada, sampai dengan tahun 2019 telah terakreditasi 188 puskesmas atau 91,26 persen, dengan rincian 26,7 persen terakreditasi dasar, 54,37 persen terakreditasi madya, 8,74 persen terakreditasi utama dan 1,47 persen terakreditasi paripurna.





Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2020

Gambar 3-14 Persentase akreditasi puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2019

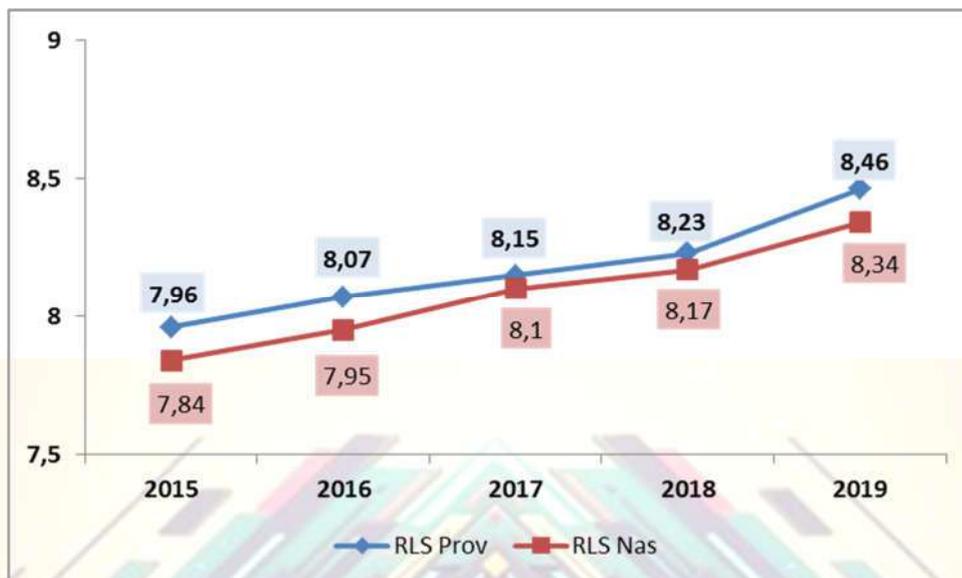
2. Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan taraf kehidupan, sudah selayaknya masyarakat mengedepankan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah proses belajar mengajar agar peserta didik menjadi aktif dan berkembang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator pembentuk IPM yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Beberapa informasi yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah adalah partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang disusuki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar 8,46 tahun atau mengalami kenaikan 0,23 tahun dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 (dua) atau kelas 3 (tiga) SMP. Selama rentang waktu tahun 2015-2019 capaian RLS Provinsi Jambi lebih baik dari capaian nasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan RLS ini adalah memperkecil angka



putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.



Sumber : BPS, 2020

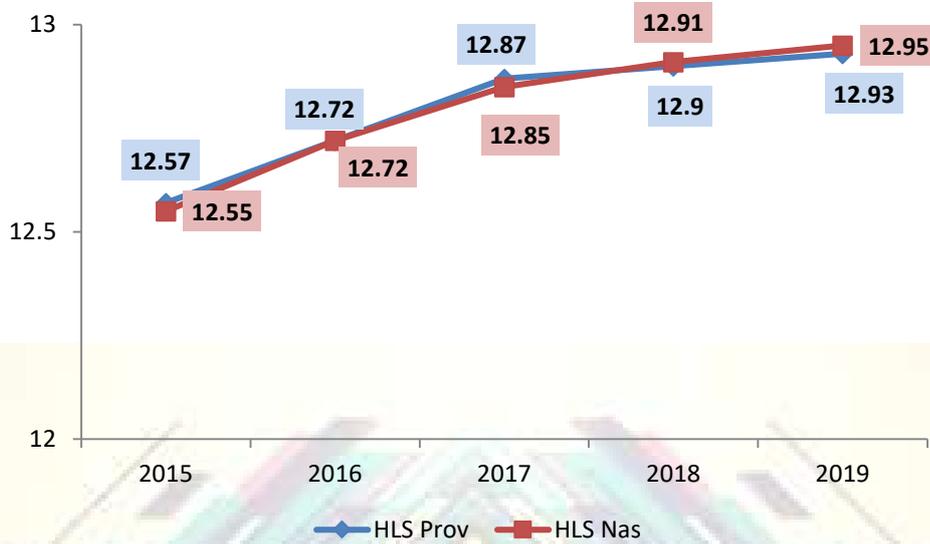
Gambar 3-15 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2019

Kesempatan seluas-luasnya telah diberikan kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan berbagai upaya, pemerintah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2019 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. Upaya yang dilakukan antara lain adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 161 Sekolah Menengah Atas, 104 Sekolah Menengah Kejuruan dan 13 sekolah luar biasa. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan RLS adalah pemberian beasiswa, dimana pada tahun 2019 telah disalurkan Rp 14.464.767.500,- beasiswa kepada siswa SMA, SMK, SLB, UKK, Beasiswa Hafidz Alqur'an, D3, S1, S2, S3 dan dokter Spesialis.

Selain RLS, indikator dimensi pengetahuan dalam IPM lainnya adalah Harapan Lama Sekolah atau HLS. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Pada rentang 2015-2017 capaian HLS Provinsi Jambi selalu lebih tinggi dari nasional, namun dua tahun terakhir peningkatan HLS nasional lebih cepat dari Provinsi Jambi walaupun dengan selisih yang sangat kecil. Pada tahun 2019, anak-anak berusia 7 tahun di Provinsi Jambi memiliki



harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,93 tahun atau hingga Diploma I, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun 2018 yang lalu.



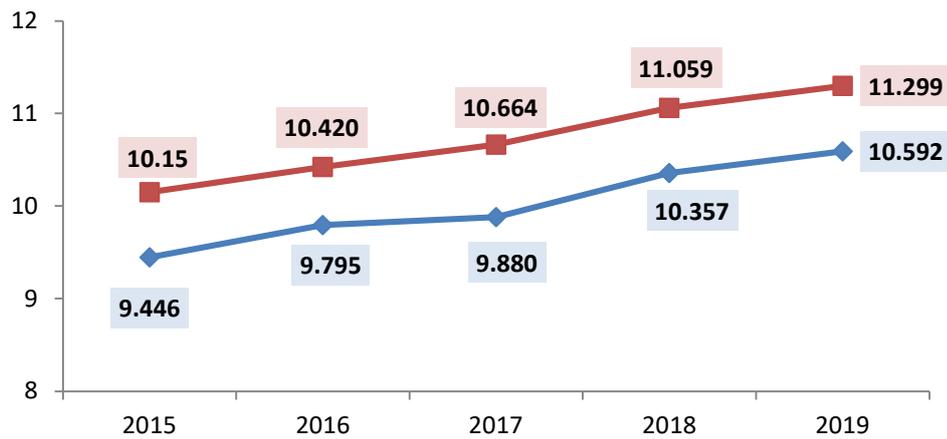
Sumber : BPS, 2020

Gambar 3-16 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2019

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012). Pada tahun 2019, pengeluaran perkapita masyarakat Provinsi Jambi mencapai Rp10,592 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar Rp235 ribu atau 2,27 persen dari capaian tahun 2018.





—◆— pegeluaran perkapita per tahun Prov (Rp.juta)
 —■— pegeluaran perkapita per tahun Nas (Rp.juta)

Sumber: BPS, 2020

Gambar 3-17 Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan ketiga dimensi di atas. Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung upaya tersebut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
5. Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi
6. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
7. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
16. Program peningkatan sarana dan Prasarana olahraga dan pemuda



17. Program Kesehatan Ibu dan Anak
18. Program kesehatan anak balita
19. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20. Program Pendidikan SMA
21. Program Pendidikan SMK
22. Program BOS
23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Permasalahan:

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

Solusi:

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.



4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan

3

Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender; serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya.



Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang capaiannya pada tahun 2019 (kondisi tahun 2018) adalah sebesar 67,78.

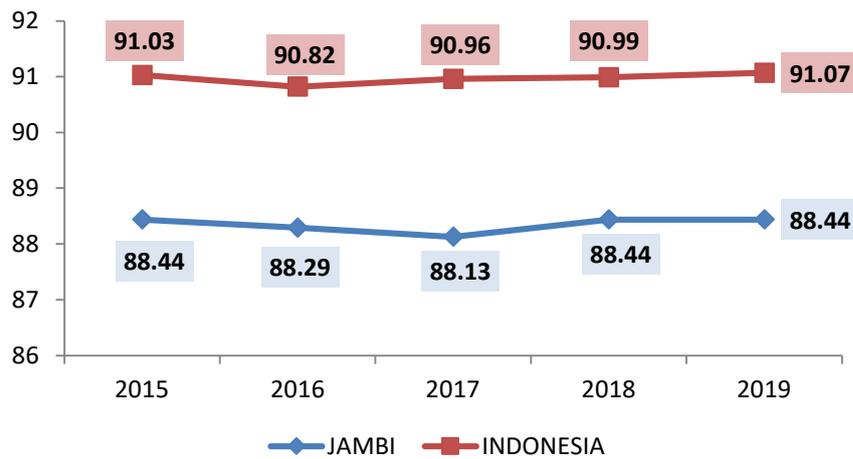


Sumber: DP3AP2, 2020

Gambar 3-18 Capaian IDG sebagai indikator sasaran meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

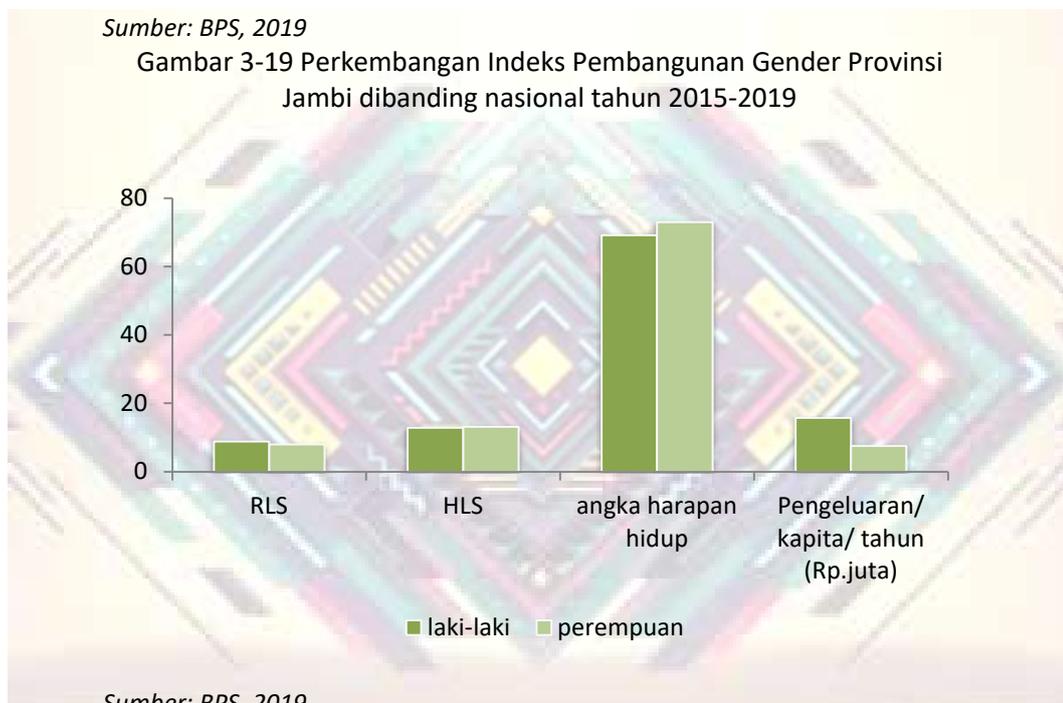
Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM. Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.





Sumber: BPS, 2019

Gambar 3-19 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2019

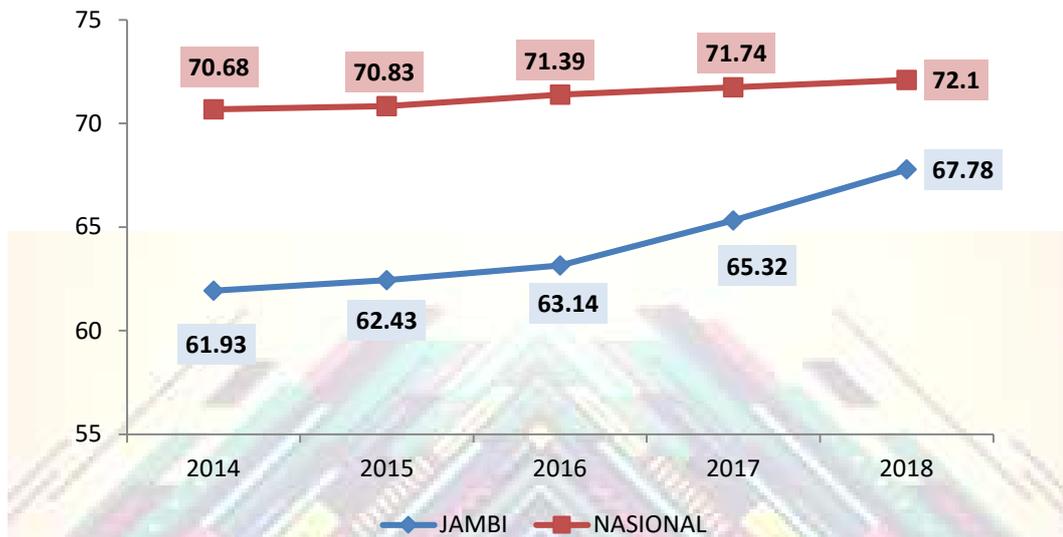
Gambar 3-20 Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2019

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2019 (kondisi Tahun 2018)



adalah 67,78 atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 104,1% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 101,14%.

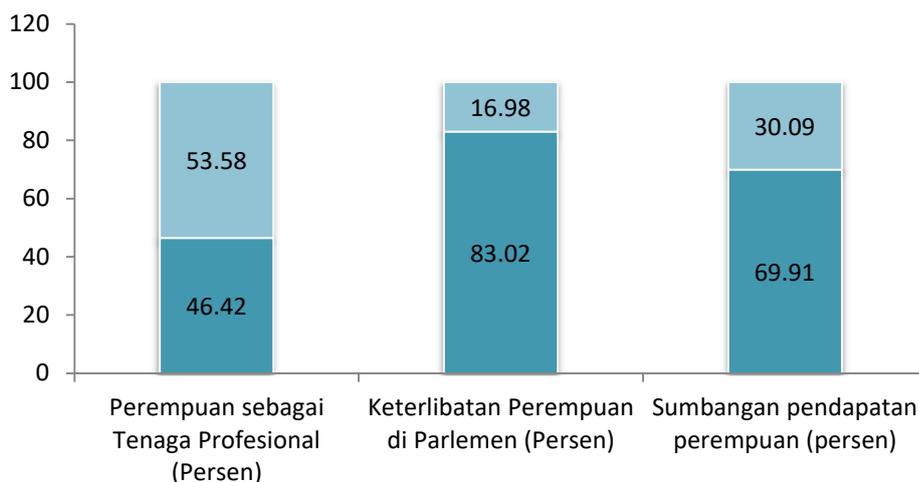


Sumber: BPS, 2019

Gambar 3-21 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi Tahun 2014-2018

Capaian IDG Provinsi Jambi tersebut, masih berada di bawah capaian nasional dengan tren meningkat lebih cepat dari nasional. Bila digambarkan dalam diagram pengelompokan capaian IPM dan IDG, maka Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG di bawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan perempuan di parlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki. Namun pada komponen perempuan sebagai tenaga profesional terlihat bahwa persentase perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan di Provinsi Jambi sudah diperhitungkan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang menuntut profesionalitas.

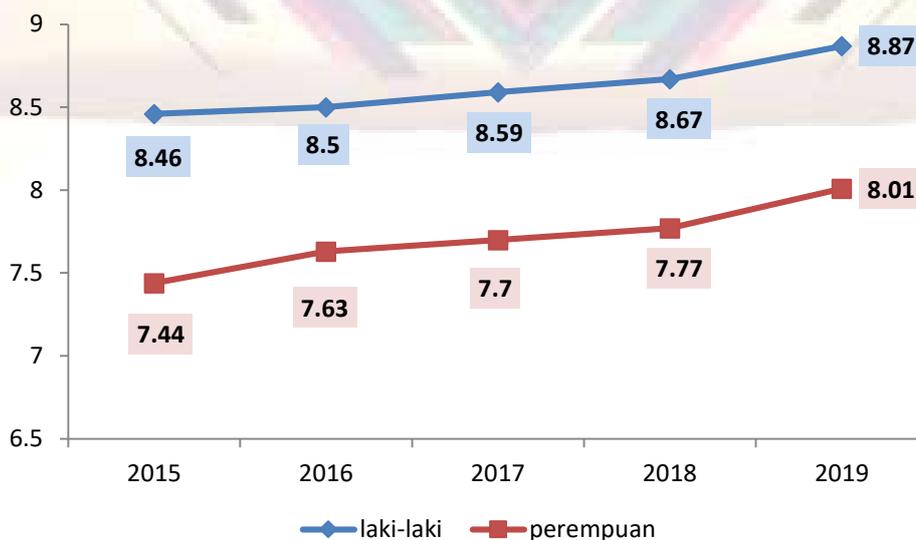




Sumber: BPS, 2019

Gambar 3-22 Capaian Komponen Pembentuk IDG Provinsi Jambi Tahun 2018

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2020, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.



Sumber: Jambi Dalam Angka 2020, 2020

Gambar 3-23 Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jambi



Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti **program perwujudan demokrasi makin kokoh** dan lain-lain.

Permasalahan:

1. Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, dan rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.

Solusi:

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.



Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah



Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

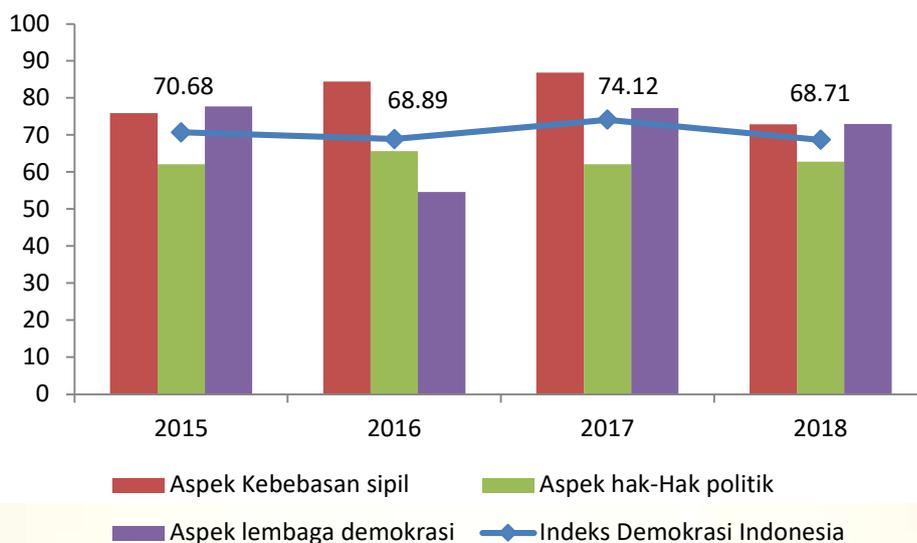
Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif dengan menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik, dan lain-lain. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, dengan capaian tahun 2019 sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 3-24 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi sebagai indikator Sasaran terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dihitung dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik dilihat dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, sedangkan aspek lembaga demokrasi dilihat dari Pemilu, peran DPRD, peran Parpol, peran birokrasi dan peran peradilan yang independen.





Sumber: BPS, 2019

Gambar 3-25 Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan pada tahun tertentu (n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh sebab itu, data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS pada Bulan Agustus 2019 merupakan kondisi tahun 2018. Berdasarkan data IDI di atas, terlihat bahwa capaian indeks ini berfluktuatif. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. Pada tahun 2019 (kondisi tahun 2018) realisasi IDI Provinsi Jambi terealisasi sebesar 68,71 dalam skala indeks 0 sampai 100 atau menurun 5,41 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan persentase capaian sebesar 89,39% dari target 76 dan masuk dalam kategori **tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka capaian ini masuk dalam kategori tinggi atau mencapai 85,024%.

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari ketiga aspek IDI, dua aspek mengalami penurunan dan hanya satu aspek yang mengalami peningkatan. Aspek yang mengalami peningkatan adalah aspek hak-hak politik dengan peningkatan sebesar 0,68 poin. Sedangkan aspek lembaga demokrasi menurun sebesar 4,35 poin dan aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 13,93 poin. Dari 28 indikator IDI, terdapat tiga belas indikator yang memiliki skor dengan kategori baik atau skor >80. Lima indikator berasal dari aspek kebebasan sipil, yaitu:

- a. Indikator 2, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat



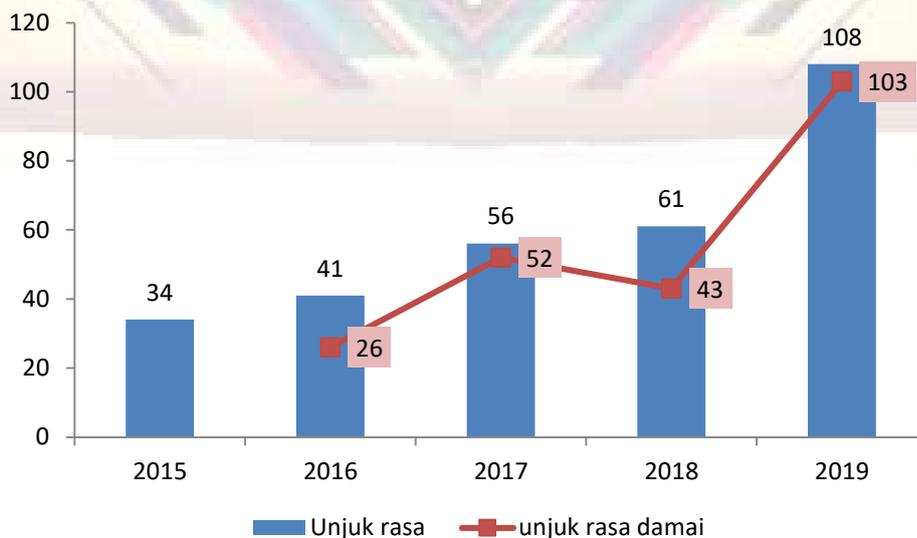
- b. Indikator 7, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
- c. Indikator 8, aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
- d. Indikator 9, tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya, dan
- e. Indikator 10, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

Dua indikator dari aspek hak-hak politik yaitu:

- a. Indikator 11, hak memilih atau dipilih terhambat
- b. Indikator 17, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Enam indikator dari aspek lembaga demokrasi, yaitu:

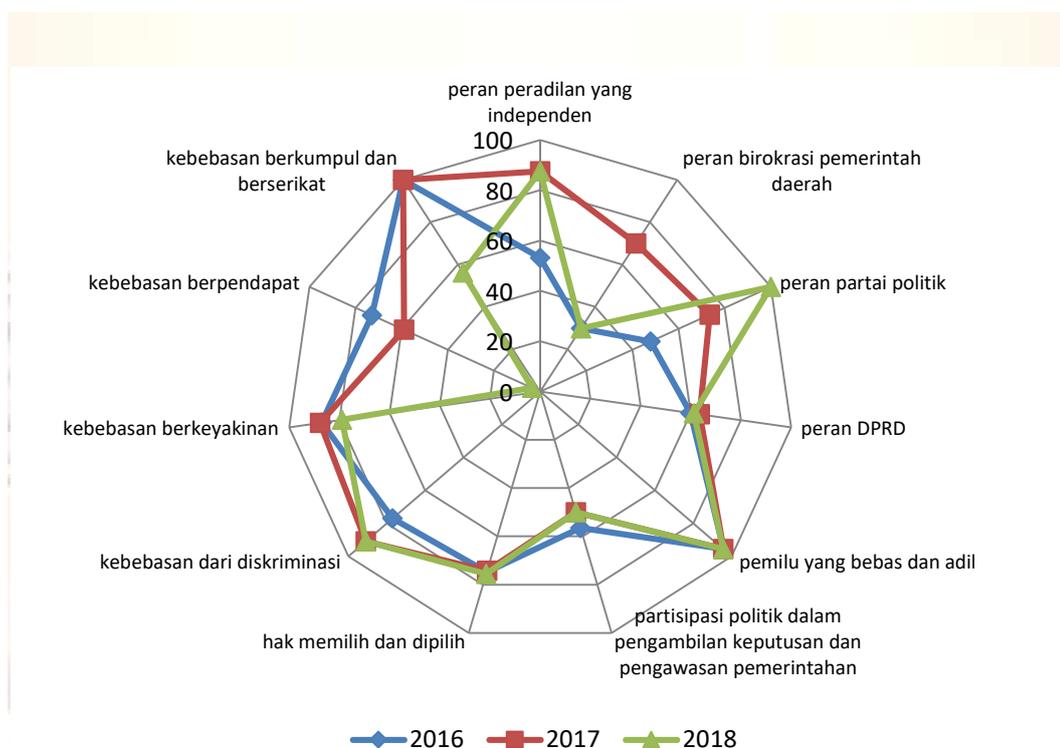
- c. Indikator 18, keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
- d. Indikator 19, kecurangan dalam penghitungan suara
- e. Indikator 20, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD
- f. Indikator 23, kegiatan kaderisasi yang dilakukan Parpol peserta Pemilu
- g. Indikator 24, persentase perempuan pengurus partai politik
- h. Indikator 28, penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi



Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2020
 Gambar 3-26 Demonstrasi yang terjadi tahun 2019



Aspek kebebasan sipil ditunjang oleh aksi demonstrasi yang damai dan tidak anarkis. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2019 terjadi 108 kali unjuk rasa dengan 5 kali unjuk rasa berujung anarkis atau 4,67 persen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan



Sumber: BRS IDI Provinsi Jambi 2018, BPS, 2019

Gambar 3-27 Perkembangan Indeks variabel IDI Provinsi Jambi Tahun 2016-2018

Variabel yang mengalami peningkatan adalah variabel hak memilih dan dipilih dan peran partai politik, dengan peningkatan terbesar pada variabel peran partai politik, yaitu sebesar 26,44. Sedangkan variabel lain cenderung stagnan atau menurun. Sedangkan indikator yang mengalami peningkatan adalah indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, dan indikator persentase perempuan pengurus partai politik. Sedangkan



indikator lainnya cenderung stagnan ataupun menurun. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik di Provinsi mulai menunjukkan perkembangan yang positif dan Pemerintah Provinsi Jambi mulai fokus dalam pembangunan manusia di provinsi Jambi dengan mengalokasikan anggaran yang berimbang pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3-10 Perkembangan Skor Indikator per Variabel Aspek IDI Provinsi Jambi Tahun 2017-2018

No	Nama Variabel	2017	2018
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	50,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
3	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70,83	4,17
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	82,61	78,26
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	50,00
7	Ancaman /penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	100,00	100,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83,33	83,33
9	Tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	90,63	90,63
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	100,00



No	Nama Variabel	2017	2018
12	kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	72,37	72,37
14	Voters Turnout	77,25	77,25
15	persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	42,42	56,60
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00
Lembaga Demokrasi			
18	keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	91,14	91,14
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	71,83	91,97
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	100,00	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57	3,57
23	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	71,43	100,00
24	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	92,72	100,00
25	kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan bersaah oleh keputusan PTUN	73,68	55,26
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah	66,66	8,33
27	keputusan hakim yang kontroversial	75,00	75,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Sumber: BRS IDI Provinsi Jambi 2018, BPS, 2019

Adapun program pendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. program pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi ketertiban dan keamanan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Program advokasi hukum dan HAM
6. Program dokumentasi dan informasi produk hukum
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program perwujudan demokrasi makin kokoh



9. Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Permasalahan;

1. Aksi unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung menggunakan kekerasan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.

Solusi:

1. Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada era demokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forum komunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan.



Meningkatnya Total factor Productivity (TFP)

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity* (TFP). Penggunaan *Total Factor Productivity* (TFP) sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi cukup beralasan karena TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



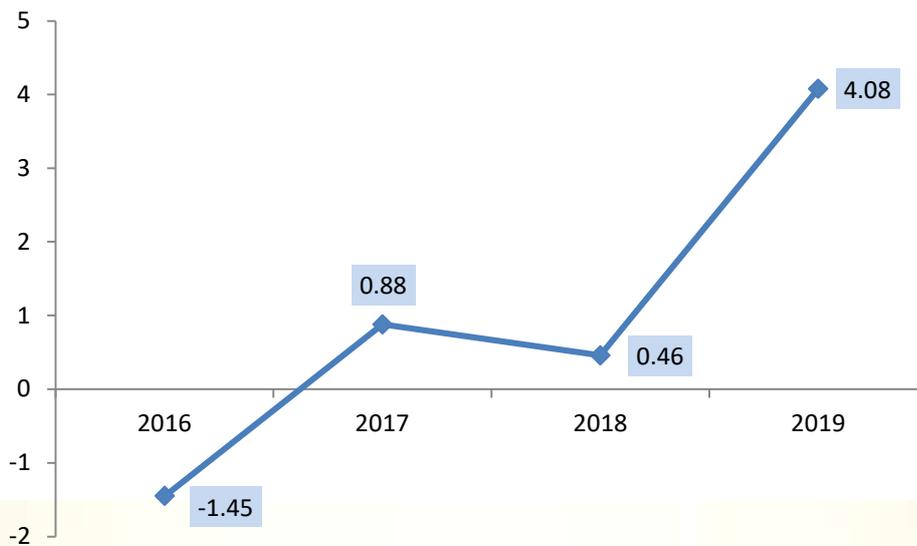


Gambar 3-28 Capaian Total Factor Productivity sebagai indikator Sasaran Meningkatkan Total Factor Productivity (TFP)

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan Total Factor Productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi "pesan" penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan lebih mudah.





Sumber: Bappeda Prov. Jambi (hasil analisis), 2020

Gambar 3-29 Total Factor Productivity (TFP) Provinsi Jambi

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 4,08 atau terealisasi 313,85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,3 dan termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Salah satu kontributor pertumbuhan TFP adalah teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya alam baik pertambangan, migas maupun sumber daya perkebunan. Selain itu pertumbuhan pengguna telepon selular dan dampak industri 4.0 turut memberikan andil dalam pertumbuhan TFP ini. Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan TFP adalah:

1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
4. Program Peningkatan Daya Saing KUKM
5. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
6. Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi
7. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Permasalahan:

1. TFP yang tinggi harus diiringi dengan kemampuan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja yang lebih baik, jika tidak maka akan menambah pengangguran di Provinsi Jambi.



Solusi:

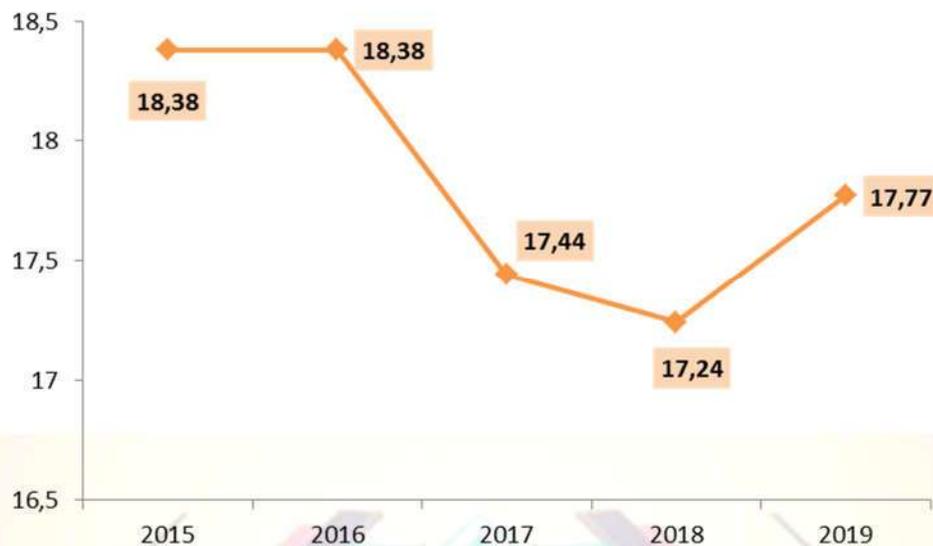
1. Upaya-upaya peningkatan kapasitas kemampuan angkatan kerja khususnya dalam penguasaan teknologi harus terus dilakukan, agar mereka dapat tertampung di dunia kerja.



Gambar 3-30 Capaian Indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB sebagai indikator sasaran perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisa dilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi yang masih merupakan share tertinggi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau mengurangi share sektor primer dan mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.





Sumber: BPS, data diolah, 2020

Gambar 3-31 Share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi

Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2019, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori **tinggi** karena mencapai 84,62%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana terlihat pada gambar di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan tahun 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019.

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan kawasan di Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain:

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan.



2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
3. Menginisiasi pemanfaatan produk karet alam untuk komponen infrastruktur strategis.

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan
3. Program perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia
6. Program Peningkatan Produksi dan teknologi budidaya perkebunan
7. Program Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan:

1. Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan, karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi dan kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan industri.

Solusi:

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang serta mendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlu penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala





Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah ketersediaan energi, dengan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 3.047 kkal/kap/hari.



Gambar 3-32 capaian indikator ketersediaan energi sebagai indikator Sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi



telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, selama kurun waktu 2013 – 2019 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia sebesar **112,805 ton beras**, dan selama kurun waktu tersebut telah digunakan sebanyak **71,534 ton** beras untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Merangin sehingga stok cadangan pangan pemerintah Provinsi di Gudang Perum Bulog per September 2019 sebesar **41,271 ton** beras.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Tabel 3-11 Cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

No	Tahun	Pengadaan CPPD (Kg)	Penggunaan CPPD (Kg)	Saldo/Stok (Kg)
1	2013	70.000	-	70.000
2	2014	20.000	3.449	86.551
3	2015	-	9.349	77.203
4	2016	-	22.839	54.364
5	2017	7.000	6.102	55.262
6	2018	12.000	5.400	61.862
7	2019	3.805	24.396	41.271
Jumlah		112.805	71.534	41.271

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2020

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.047 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal



sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

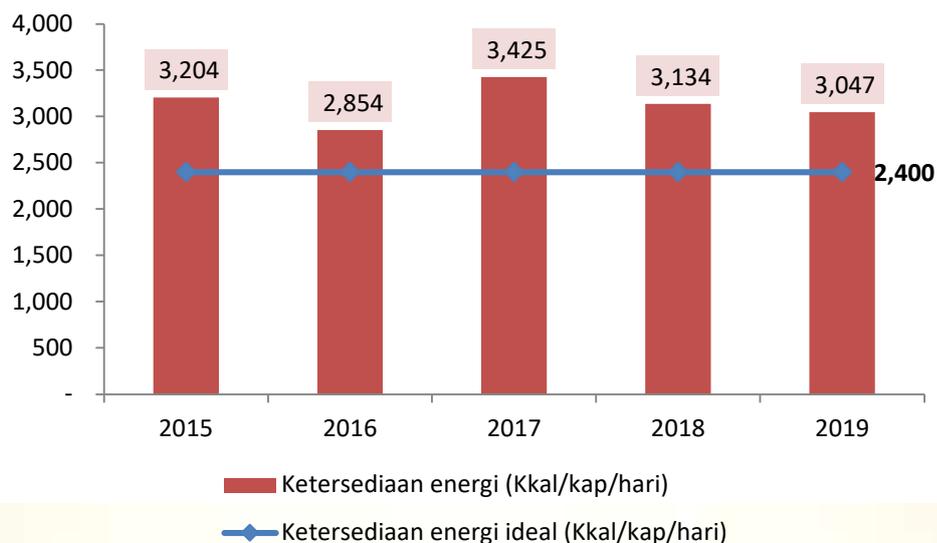
Tabel 3-12 Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi-Padian	1.520	1.200
2.	Umbi-Umbian	98	144
3.	Pangan Hewani	183	288
4.	Minyak Dan Lemak	712	240
5.	Buah Biji/ Berminyak	208	72
6.	Kacang-Kacangan	56	120
7.	Gula	141	120
8.	Sayuran dan Buah	128	144
9.	Lain-Lain	-	72
	Jumlah	3.047	2.400

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2019, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar sebesar 3.047 Kkal/Kap/Hari dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 82,15. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012), walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 3.213 kkal/ kapita/hari atau terealisasi sebesar 94,83% dan masuk dalam **kategori sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/kap/hari maka capaian ini telah mencapai 94,72% atau kategori sangat tinggi.





Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Gambar 3-33 ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari) Provinsi Jambi Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2020

Gambar 3-34 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya

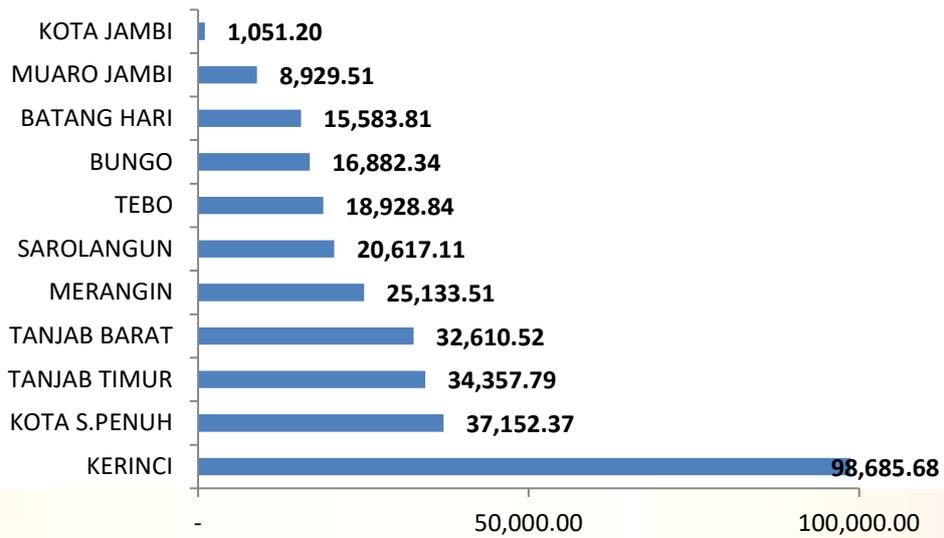


diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah **Pola Pangan Harapan** atau disingkat dengan **PPH**. Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di atas.

Ketersediaan energi ideal sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebesar minimal 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan Energi ini sangat bergantung pada Kondisi Ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi, sehingga apabila produksi bahan pangan meningkat, ada kecendrungan ketersediaan energi akan meningkat. Berdasarkan hasil survey Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 69.536,06 hektar. Luas panen tertinggi terdapat pada Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 18.597,95 hektar, sementara luas panen terendah terdapat pada Kota Jambi dengan luas panen sebesar 322,07 hektar.

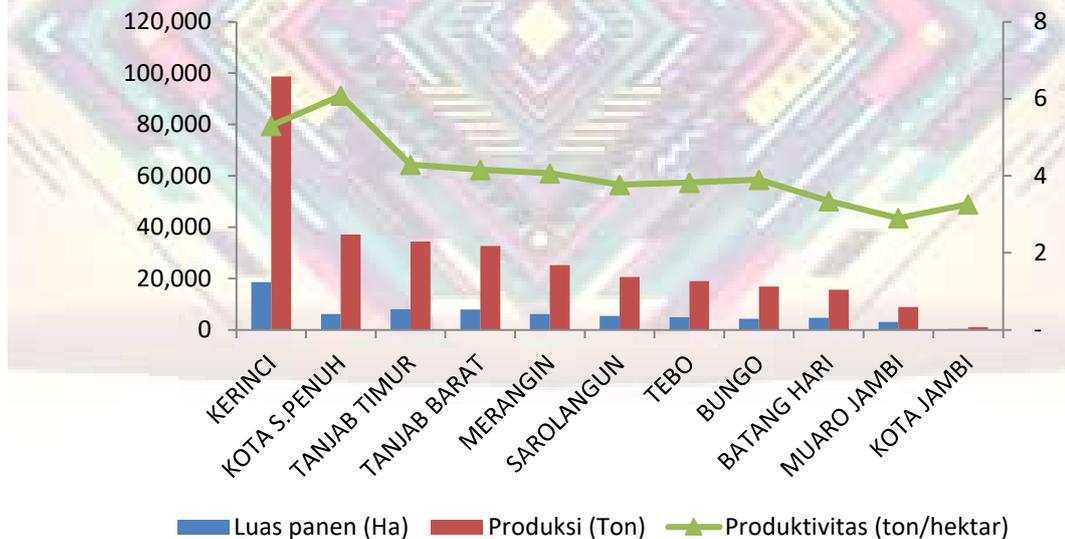
Produksi padi di Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 309.932,68 ton Gabah Kering Giling (GKG). Tiga wilayah dengan produksi padi (GKG) tertinggi di Provinsi Jambi berturut-turut adalah Kabupaten Kerinci, Kota Sei Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan produksi masing-masing sebesar 98.685,68 ton, 37.152,37 ton dan 34.357,79 ton. Sedangkan produktivitas padi Provinsi Jambi adaah sebesar 4,46 ton GKG/hektar, dengan produktivitas tertinggi terdapat pada Kota Sei. Penuh dengan produktivitas sebesar 6,09 ton GKG/ hektar dan terendah pada Kabupaten Muaro Jambi dengan produktivitas sebesar 2,9 ton GKG/ hektar.





Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS, 2020

Gambar 3-35 Produksi padi Provinsi Jambi menurut Kabupaten-kota Tahun 2019 (ton GKG)



Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS, 2020

Gambar 3-36 Luas panen, produktivitas dan produksi padi menurut Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi, Tahun 2019

Program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah **Program**



Peningkatan Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan **Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan** dan **Program peningkatan produksi ternak**.

Permasalahan:

1. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumberdaya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Menurunnya penggunaan lahan sawah setiap tahunnya rata-rata sebesar 4.909 Ha (2,95%) dan ini terjadi penggunaan lahan irigasi rata-rata pertahun sebesar 105 Ha (0,25%), lahan non irigasi rata-rata pertahun sebesar 4.814 Ha (3,84%). Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit dan karet) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

2. Terjadinyan Perubahan Iklim



Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2019 terjadi kemarau yang cukup panjang yang berdampak pada kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Hal ini mengakibatkan adanya pergeseran musim tanam.

3. Produksi tanaman pangan masih rendah

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran. Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal.

4. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi. Selain itu, keterlambatan penyaluran benih ke lapangan masih sering terjadi sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut.

5. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :



- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih
- b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kreteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
- c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
- d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
- e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

6. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT.

7. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan



hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Solusi:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.
3. Penyediaan benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan
4. Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu.
6. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju komoditi tanaman pangan dan hortikultura
8. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan secara selektif
9. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru (terutama penggunaan benih unggul)
10. Mendorong sinergitas antar subsistem agribisnis
11. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru.
12. Mendorong peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura.
13. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran
14. Mendorong pola partisipasi aktif seluruh stakeholder
15. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia
16. Pemberdayaan petani dan masyarakat.
17. Meningkatkan efisiensi usahatani, pengolahan dan pemasaran hasil





Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta merupakan aspek penting peningkatan produktivitas sektor produksi.

Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

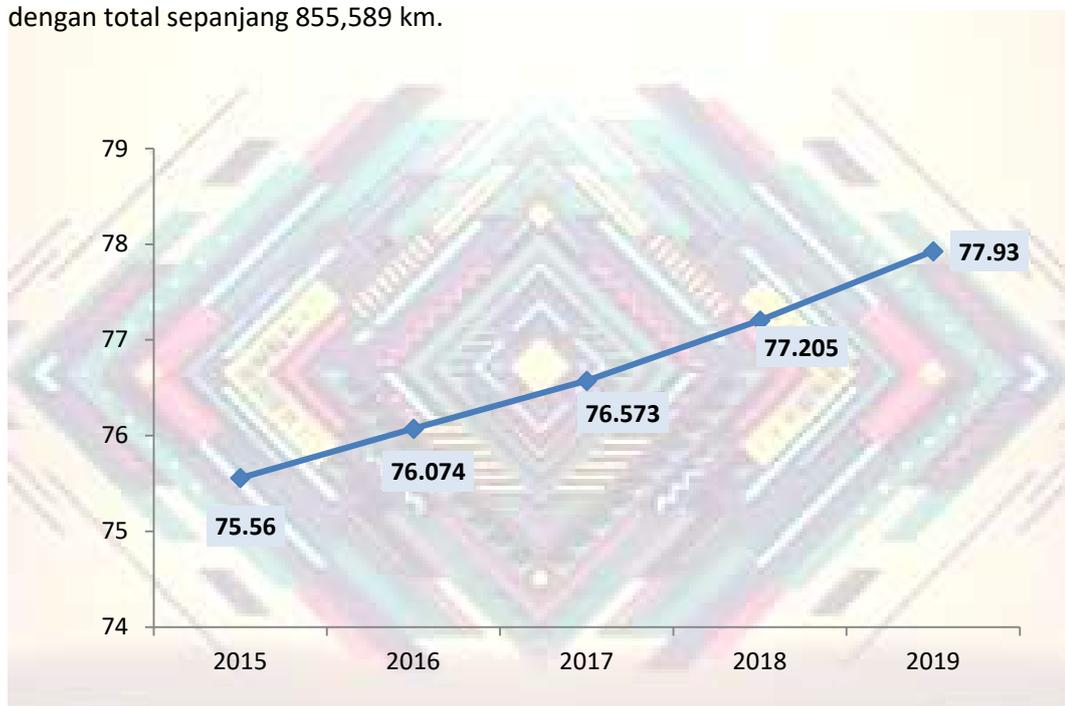
Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian ditunjukkan oleh indikator persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap. Capaian terhadap indikator tersebut pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-37 Capaian persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap sebagai indikator Sasaran Strategis Meningkatnya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian



Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral., karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra produksi dengan total sepanjang 855,589 km.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2020

Gambar 3-38 Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Tingkat kemandapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2019 difokuskan pada pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada



tahun 2019 adalah sebesar 77,93%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 78,07%, maka persentase capaian ini mencapai 99,82% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini telah mencapai 97,97% atau sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan** dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut:

1. **Pembangunan Jalan wilayah I Kab.Tanjab Barat** terealisasi 100% pada ruas
 - Jalan Sei. Saren-Teluk Nilau-parit10/Senyerang (eff.3.0 km)
 - Jalan Parit 10 / penyerang- mekar Jati- Bts. Riau (eff.3.00 km)
2. **Pembangunan Jalan wilayah II Kab.Tanjab Timur** terealisasi 92.35% pada ruas
 - Jalan Ma. Sabak/Dermaga - Ds. Rantau Rasau (Eff= 3,50 Km)
 - Jalan Ds. Rantau Rasau - Ds. Simpang (Eff= 3,00 Km)
 - Jalan Simp. Dermaga - Pelabuhan Ma. Sabak (Eff= 1,00 Km)
 - Pembukaan Jalan Ds. Simpang - Ujung Jabung (Karya Bakti)
 - Peningkatan Jalan Simp. Kota Baru - Simp. Lagan
 - Jalan Sp. Lagan - Sp. Zona Lima (Sp. Pelabi) (Eff= 1,5 Km)
 - Pembangunan Jalan Ds. Simpang - Ujung Jabung (Eff= 3,00 Km)
3. **Peningkatan Jalan diwilayah III (Kab.Muaro Jambi)** terealisasi 93.92% pada ruas
 - Peningkatan struktur jalan Sp.Pudak-Suak kandis(eff.2 km)
 - Jalan Simpang Ahok-Simp. Pasar-Bumi Perkemahan Pramuka (eff.3.2 km)
4. **Peningkatan Jalan diwilayah IV (Kab.Bungo)** terealisasi 90.03% pada ruas
 - Jalan Ma.Bungo-Peninjauan-Junction (eff.2.50 km)
 - Jalan Rantau Ikil-Bts. Sumbar (eff.2.50 km)
 - Jalan Peninjauan-Lubuk Mengkuang-TKA (Bts. Sumbar) (eff.2.00 km)
 - Jalan lingkaran Muaro Bungo Sei. Mengkuang – Simp. Sei. Buluh – Simp. Tanjung Menanti- Simp Terminal- Sei. Binjai (eff, 2.50 km)
5. **Peningkatan Jalan diwilayah IX (Kab.Tebo)** terealisasi 95.89% pada ruas
 - Jalan Simp.logpon-Padang lamo-Tanjung (eff.2.50 km)
 - Jalan simp.sawmil-simp.logpon (eff.2.00 km)
 - Jalan Simp.Betung bedarah-Pintas-Btd.Kab.Tebo/Kab.Bungo (eff.2.00km)
 - Jalan Ma.Tebo – Simp. Logpon (2.00 KM)



6. **Peningkatan Jalan diwilayah VIII (Kab.Sarolangun)** terealisasi 99.95% pada ruas
 - Jalan Sp. Pelawan-Sei Salak (2.50 Km)
 - Jalan Sei Salak-Pkn Gedang/btg. Asai (2.5 Km)
 - Jalan Pauh-Air Hitam (2.0 Km)
 - Jalan Ma. Talang – Sei.Keradak – Beringin Tinggi
7. **Peningkatan Jalan diwilayah VI (Kab.Merangin)** terealisasi 99.98% pada ruas
 - Penanganan longsoran Jl.Sp.PI.Rengas-Ma.siau-Dsn.Tuo-Jangkat
 - Berkala Jalan Sp. Pulau Rengas- Ma. Siau – Dusun Tuo (Eff= 3 Km)
 - Jalan Simp Margoyoso – Sumber Agung- Bts. Kab Merangin/Kab Sarolangun (2.75 Km)
 - Jalan Dusun Tuo – Jangkat (2.00 Km)
8. **Peningkatan Jalan diwilayah V (Kab.Batanghari dan Ma.Jambi)** terealisasi 98.87% pada ruas
 - Peningkatan Struktur jalan Tempino-Ma.Bulian (eff.3.25 km)
 - Jalan Simp.Panerokan-Sei.Bahar (eff.2.00Km)
 - Jalan Sei.Duren – Sei. Buluh dan Pemb. Box Culvert (Eff. 2.00 Km)
9. **Peningkatan Jalan diwilayah VII (Kab.Kerinci)** terealisasi 99.93% pada ruas
 - Jalan Sangg Agung – Jujun – Lempur (Eff. 2.00 Km)
 - Jalan Jujun – Sei Penuh (Eff. 2.00 Km)
 - Jalan Depati Parbo dan Simp. Debai Dusun Baru Simp. 4 Sebukar (Eff 1.5 Km)
10. **Peningkatan Jalan dengan sumber DAK** terealisasi 99.80% pada ruas Jalan Simp. Penerokan – Simp Suka Makmur/ Sungai Bahar (DAK)
11. **Peningkatan Jalan di wilayah Kota Jambi** terealisasi 95,69% pada ruas
 - Jalan Pattimura – Jl. Bakkaruddin (Eff 2 Km)
 - Jalan Abdul Rahman Saleh (Simp. Tugu Adipura Jambi) (Eff 2 Km)
 - Jalan Hj. Nurijah Arifin Manaf / Jalan Jepang (Eff 2 Km)
 - Pemeliharaan jalan Wilayah Perkotaan Jambi
 - Berkala Jalan Kol. Pol. Mattaher JL. GR. Djamin Dato Bagindo Jl. Kol. Pol. Ahmad Bastari, Jl. Brigjen Katamso
12. **Pembangunan Jembatan di Kab. Merangin dan Kerinci** terealisasi 99.93% pada
 - Pembangunan Turap Oprit Jembatan Rantau Suli (Eff 25M)
 - Pembangunan Jembatan Kelok Sago (Eff 150' M)



13. Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Provinsi Jambi terealisasi 99.82% pada

- Rehab Jembatan Sei. Pulau Musang
- Rehab Jembatan Sei. Abang
- Rehab Jembatan Sei. Kuamang
- Rehab Jembatan Sei. Tanjung
- Rehab Jembatan Sei. Tebet
- Rehab Jembatan Sei. Punt Kalo
- Rehab Jembatan Sei. Pandan
- Rehab Jembatan Sei. Alai II
- Rehab Jembatan Sei. Pandan II
- Rehab Jembatan Sei. Gemuruh
- Rehab Jembatan Sei. Air Biru
- Rehab Jembatan Sei. Jantan
- Rehab Jembatan Batang Uleh
- Rehab Jembatan Sei. Peninjauan
- Rehab Jembatan Sei. Pantai
- Rehab Jembatan Sei. Rantau Ikil
- Rehab Jembatan Sei. Pengian
- Rehab Jembatan Sei. Kayu Aro
- Rehab Jembatan Sei. Petanang
- Rehab Jembatan Sei. Penyantan
- Rehab Jembatan Provinsi Jambi (Swakelola)
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Parit Pancasila dan Jembatan Sei. Baung
- Rehab Jembatan Sei. Gedang
- Rehab Jembatan Sei. Ketalo
- Rehab Jembatan Sei. Mengkuang

Permasalahan:

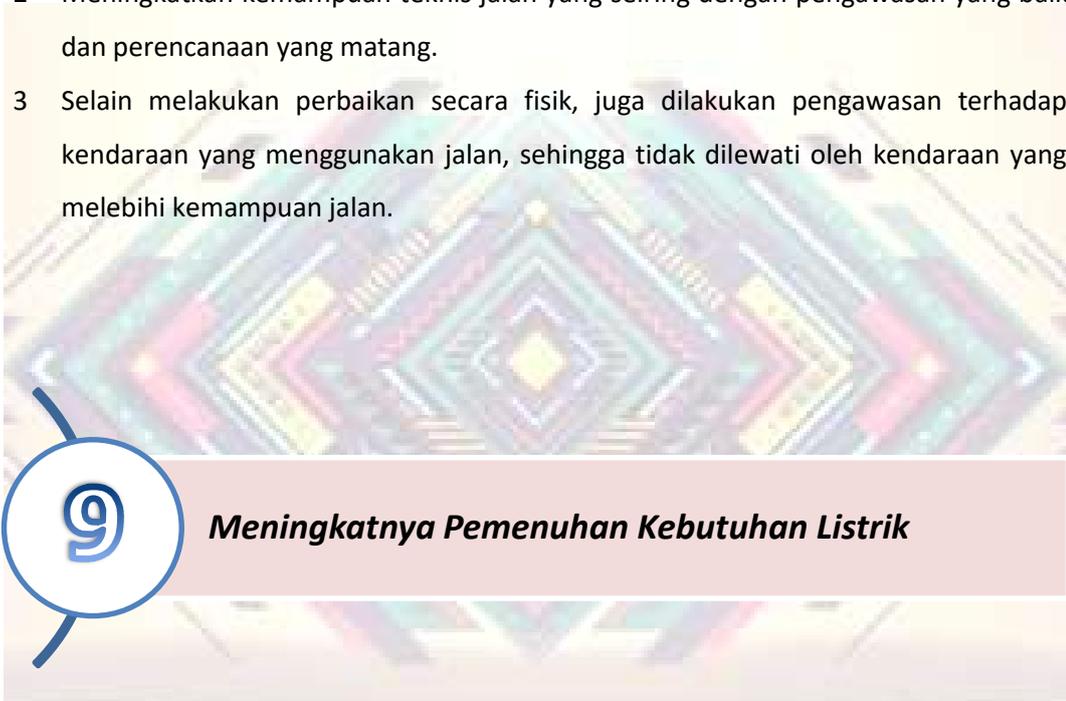
- 1 Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.



- 2 Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun

Solusi:

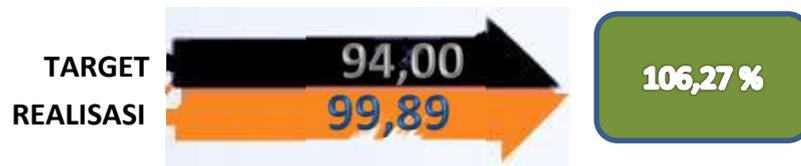
- 1 Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
- 2 Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- 3 Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

**9*****Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik***

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing. Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun indikator yang



menggambarkan capaian sasaran ini adalah Rasio Elektrifikasi, dimana capaian pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-39 Capaian Rasio Elektrifikasi sebagai indikator Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

Pada tahun 2019, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 99,89. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 94 atau terealisasi sebesar 106,27% dengan kriteria **sangat tinggi**. Capaian ini telah melewati target akhir tahun 2021 atau terealisasi mencapai 104,05% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 3-13 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020



Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Data-data lokasi potensi geothermal di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di atas. Potensi sumber enenrgi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-14 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	
		12. Desa Tanjung Beringin	
2	TEBO	13. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	14. Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		15. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		16. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4	SAROLANGUN	17. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		18. Desa Simpang Narso Kecil	
		19. Desa Padang Jering	
		20. Desa Pulau Langsat	



NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
5	BUNGO	21. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		22. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		23. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		24. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-15 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

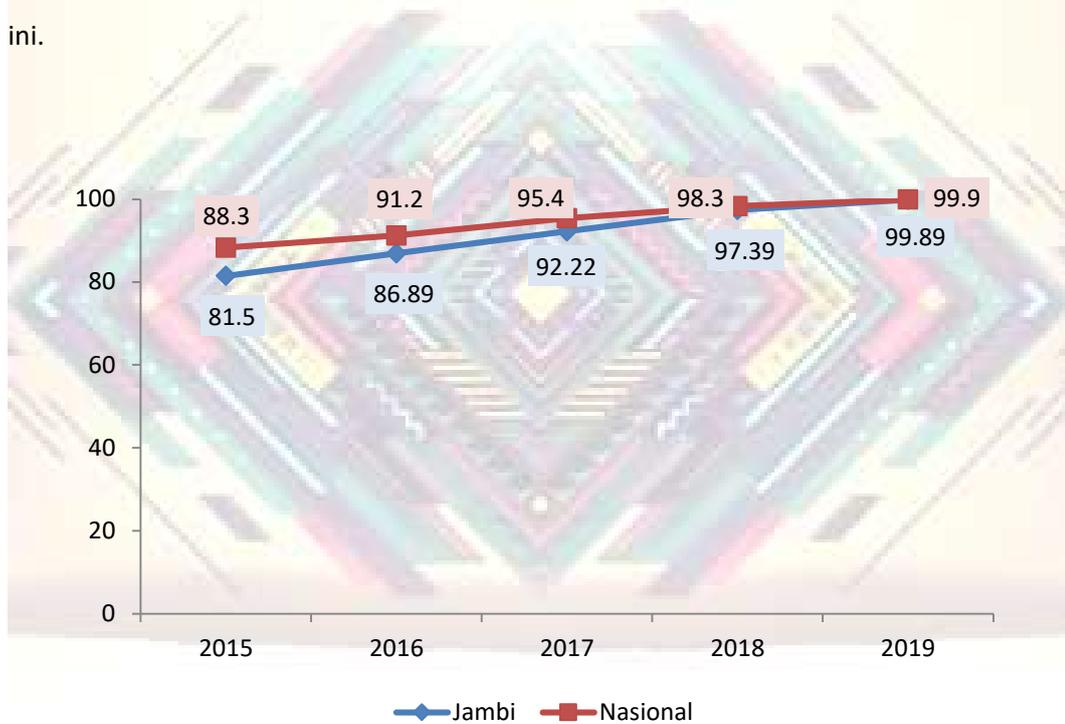
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan



system Solar Home System (SHS) dan biogas yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi.

Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas ESDM, 2020

Gambar 3-40 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi selalu berada di bawah nasional, namun dengan gap yang semakin mengecil, bahkan pada tahun 2019 capaiannya hanya selisih 0,01 dibanding nasional. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah **Program Pengembangan**



Energi, dengan kegiatan yang dilakukan antara lain revitalisasi PLTS Komunal Talang Aro Kab. Batanghari.

Permasalahan:

1. Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum termanfaatkan secara maksimal

Solusi:

1. Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk listrik perdesaan dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi



Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan irigasi

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan



terjangkau pada tahun 2030. Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan pedesaan, sedangkan capaian pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi ditunjukkan oleh indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

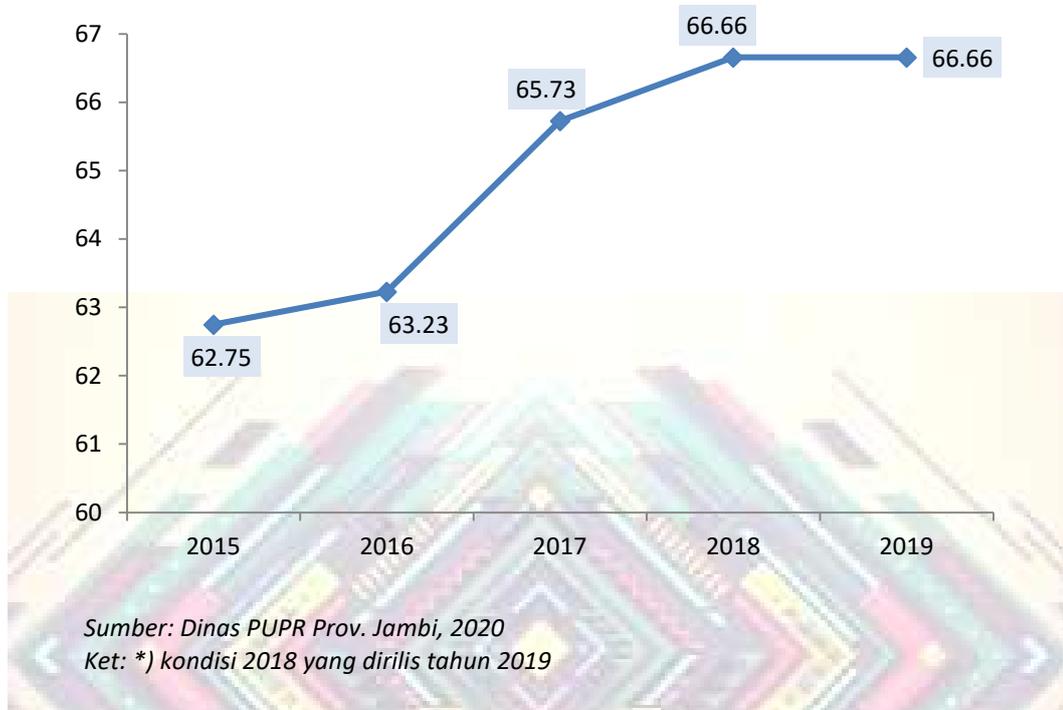


Gambar 3-41 Capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih Tahun 2019

Pada tahun 2019, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 66,66 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 70,00 persen atau terealisasi sebesar 95,23% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan



dengan target akhir tahun 2021 maka realisasinya mencapai 83,33% dengan kategori tinggi.



Gambar 3-42 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah sebesar 66,66%. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 70% atau hanya terealisasi sebesar 95,23% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini baru memenuhi 83,33% dari target akhir dan masih termasuk dalam kategori tinggi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan



oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah:

1. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

Permasalahan:

- 1 Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi:

- 1 Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

2. persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2018 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.



Gambar 3-43 Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebagai indikator sasaran pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi

Pada tahun 2019, capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 73,3 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80,00 persen atau terealisasi sebesar 91,63% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka realisasinya mencapai 80,55 persen dengan kategori tinggi. Capaian tahun 2019 tersebut mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2018, dimana pada tahun 2018 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 77,2 persen. Hal ini disebabkan oleh kejadian longsor pada saluran primer Daerah Irigasi Limun Singkut pada tahun 2019 lalu, sehingga menurunkan kondisi irigasi tersebut.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2020

Gambar 3-44 Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan



Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air.

Permasalahan:

1. Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi karena beberapa faktor, salah satunya faktor alam seperti longsor yang penanganannya tidak bisa langsung pada tahun anggaran tersebut.

Solusi:

1. Percepatan rehabilitasi jaringan pada Tahun Anggaran 2020.



11

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di Provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Keinginan luhur tersebut diejawantahkan dalam salah satu sasaran strategis daerah, yaitu “meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan”. Capaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 3-45 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan



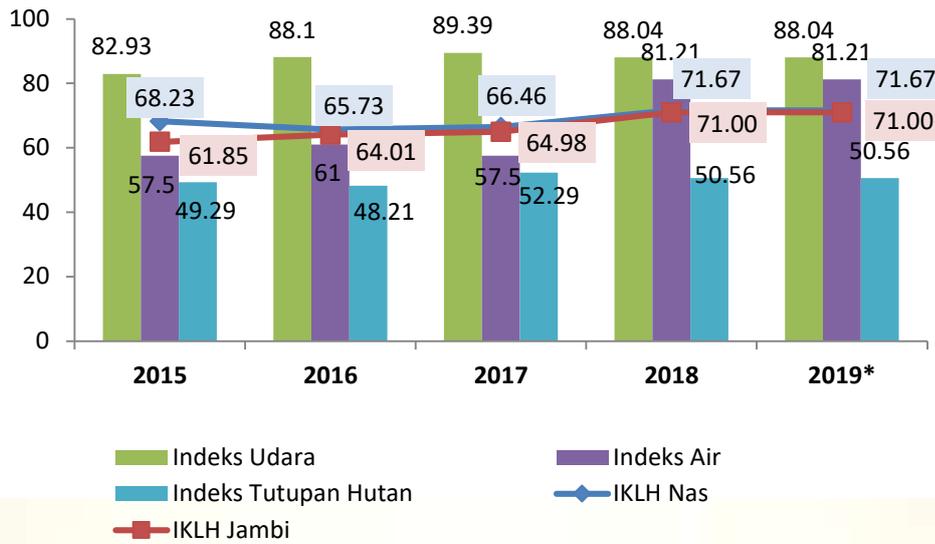
Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan hutan.

IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan.

Data realisasi IKLH tahun 2019 yang disampaikan pada laporan ini merupakan data yang dirilis pada tahun 2019 dan merupakan kondisi tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH Provinsi Jambi melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 110,08% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir, maka realisasi ini telah mencapai 107,58% dari target akhir IKLH pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 66,0 atau telah terealisasi sangat tinggi.



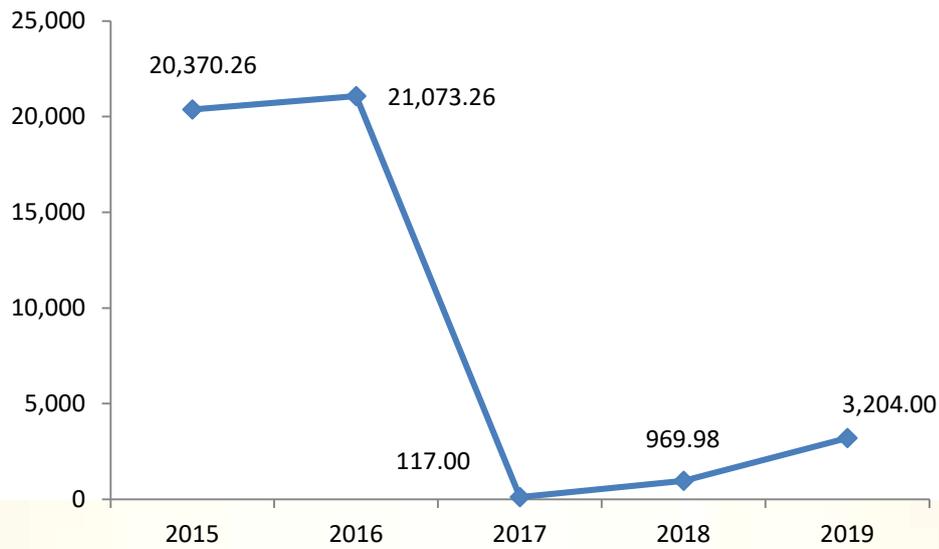


Sumber: Kemen LH (diolah), 2019

Gambar 3-46 Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional

Gambar di atas memperlihatkan bahwa IKLH Provinsi Jambi masih terus dibawah IKLH Nasional, namun terlihat perbaikan yang lebih cepat dibanding nasional. Bahkan pada tahun 2019 selisih antara IKLH Nasional dan Provinsi Jambi hanya 0,67. Namun demikian, upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan harus tetap dilakukan secara masif. Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 3.204 hektar yang bersumber dari dana DBH-DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 0,37 persen.



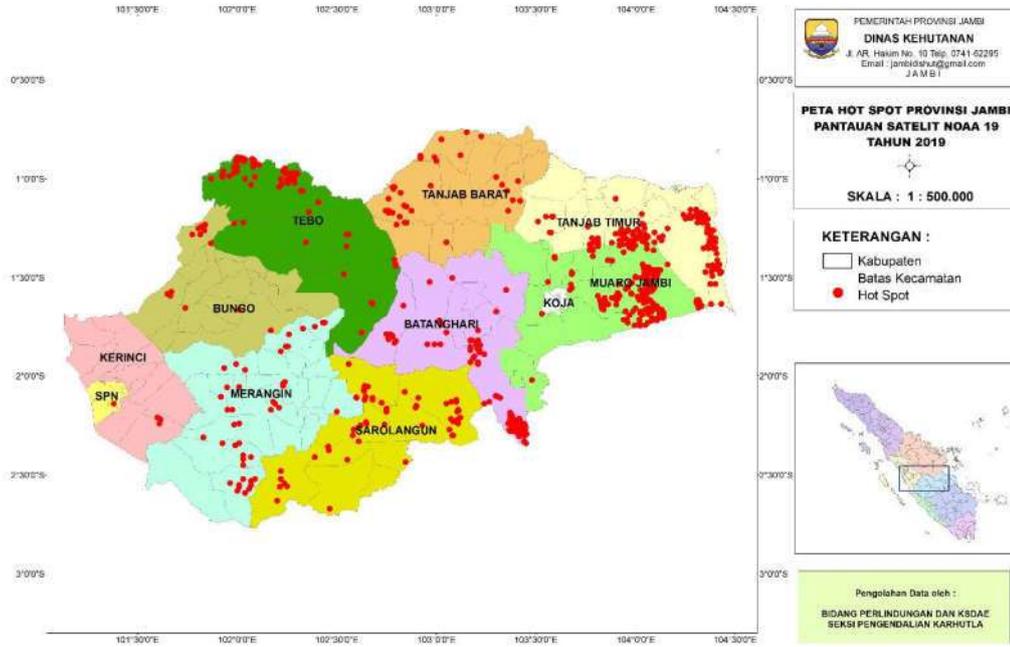


Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2020

Gambar 3-47 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2015-2019

Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 cukup berat karena musim kemarau yang panjang. Berdasarkan data pemantauan hot spot, terdapat 642 hot spot di Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota dan terbanyak berada di Kabupaten Muaro Jambi. Peningkatan jumlah hot spot ini juga meningkatkan luas lahan dan hutan yang terbakar pada tahun 2019.



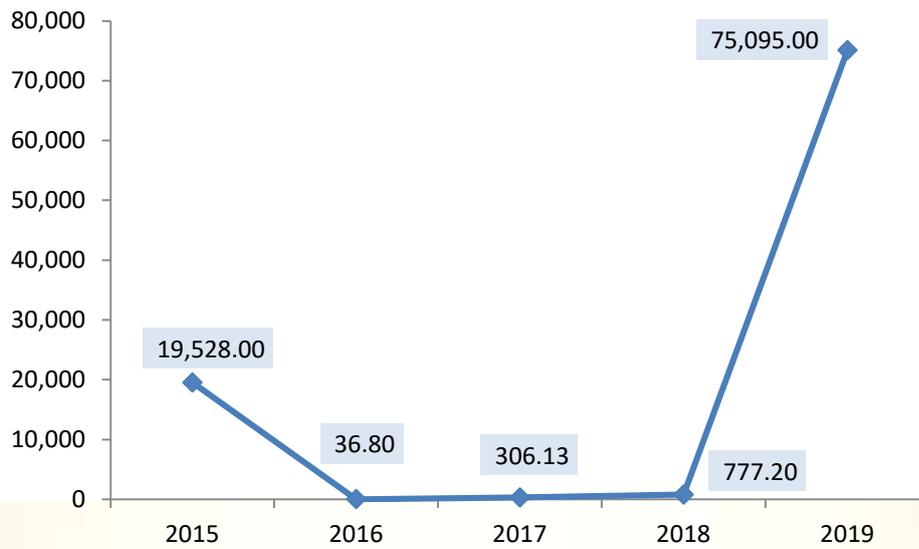


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2020
 Gambar 3-48 Sebaran Hotspot di Provinsi Jambi Tahun 2019



Sumber: Dinas Kehutanan Prov.Jambi, 2020
 Gambar 3-49 Perkembangan Jumlah Hot spot di Provinsi Jambi





Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2020

Gambar 3-50 Luas Lahan dan Hutan terbakar di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Sumber daya alam bukan hanya hutan, namun semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan IKLH, Pemerintah Provinsi Jambi juga berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Salah satunya adalah pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.

Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat,



menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain:

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral
7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar perusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*. Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Landrent* dan *royalti* dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Terkait dengan kepatuhan PNBP, pada tahun 2019 Provinsi Jambi mendapatkan Juara III Penghargaan



Subroto Bidang Kepatuhan PNBP Mineral dan Batubara Kategori Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Terbaik.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis ini adalah:

1. Program Pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
2. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program : Perlindungan dan Konservasi SDA
5. Program Pemanfaatn Potensi Sumber Daya Hutan
6. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Permasalahan:

1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan mulai tumbuh namun belum optimal.
3. Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara

Solusi:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas, dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali.
3. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.



- Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

12 *Menurunnya Angka Kemiskinan*

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan, dan capaian tahun 2019 terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

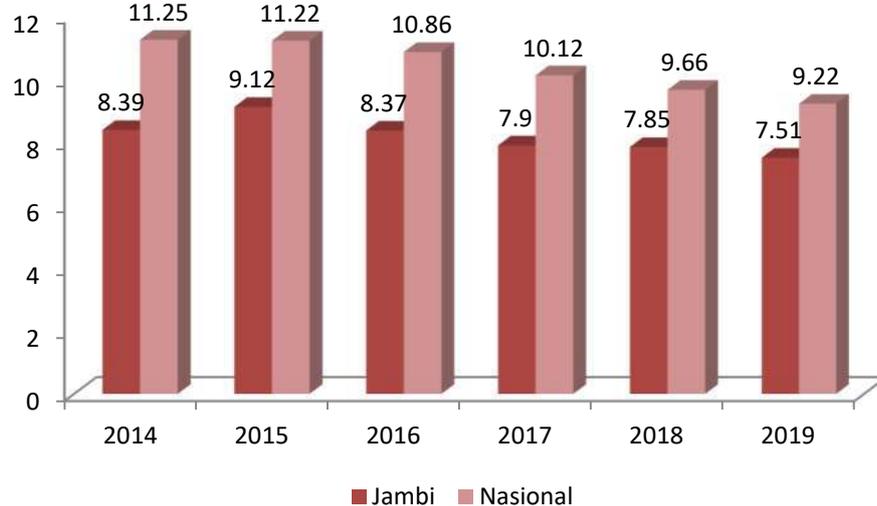


Gambar 3-51 Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan



Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, Angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 101,32%, atau masuk **kategori sangat tinggi** dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya telah mencapai 97,37% dan juga termasuk kategori sangat tinggi.

Batas yang digunakan untuk pengelompokan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin adalah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selama periode Maret-september 2019 naik sebesar 3,58 persen, yaitu dari Rp448.509,- per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp464.558,- per kapita perbulan pada September 2019. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2019 sebesar 76,54%.



Sumber: BPS, 2019

Gambar 3-52 Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan nasional



Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah indeks kealaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2019, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. **Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,228 pada Maret 2019 menjadi 1,169 pada September 2019.** Demikian pula **indeks keparahan kemiskinan, turun dari 0,299 menjadi 0,264 pada periode yang sama.** Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani dan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Demikian pula pada nelayan dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil dan investasi pertanian
2. Program pengembangan usaha peternakan
3. Program pengembangan perikanan budidaya
4. Program pengembangan perikanan tangkap



5. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
6. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
7. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
8. Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
9. Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Permasalahan:

1. Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.

Solusi:

1. Menjaga stabilitas harga yang mampu diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi inflasi
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian



Menurunnya Angka Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Capaian sasaran

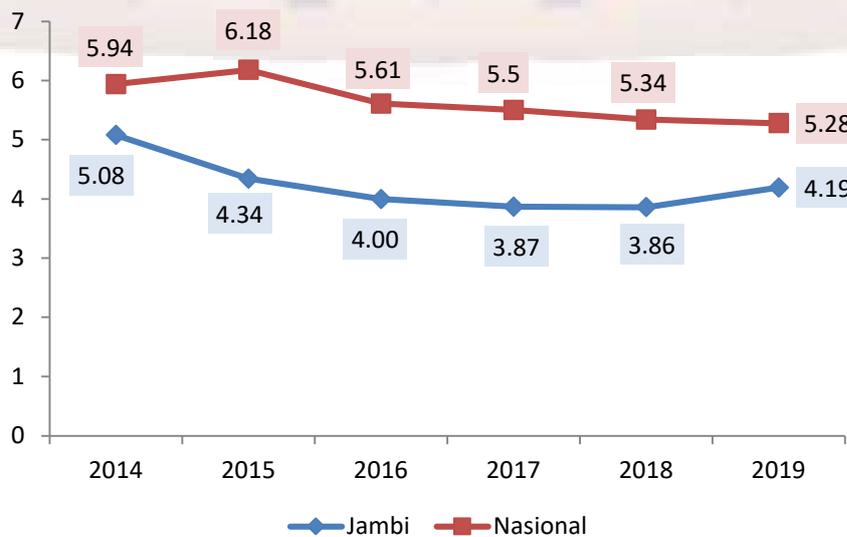


menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan capaian pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-53 Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran

Capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2019 terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan. TPT Tahun 2019 sebesar 4,19 % atau meningkat 0,33% dibandingkan kondisi tahun 2018 dan terealisasi sebesar 65,31% (**rendah**). Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori rendah karena baru mencapai 57,15% dari target sebesar 2,8%. Namun demikian, TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dibandingkan nasional dan beberapa daerah lainnya.



Sumber: BPS, 2019

Gambar 3-54 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional (Agustus)



Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

Kondisi ketenagakerjaan dirilis oleh BPS 2 kali setahun, yaitu pada Bulan Februari dan Agustus. Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 24.690 orang dibanding Agustus 2018 atau berkurang 1,38 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2019 adalah sebesar 66,09% atau memperlihatkan penurunan sebesar 2,37 % dibanding Agustus 2018 yang menunjukkan data sebesar 68,46%. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunann potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Bila dilihat tren sektoral selama Agustus 2018 – Agustus 2019, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (0,83 persen poin), sektor industri pengolahan (0,61 persen poin), dan sektor pertambangan (0,33 persen poin). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian (1,91 persen poin), sektor jasa pendidikan (0,41 persen poin) dan sektor konstruksi (0,25 persen poin).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri, Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 guna mendukung pencapaian



indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
2. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja
3. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Permasalahan:

1. TPT di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan menengah kejuruan dan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah.

Solusi:

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :
 - Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
 - Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
 - Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mempeluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.



14

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

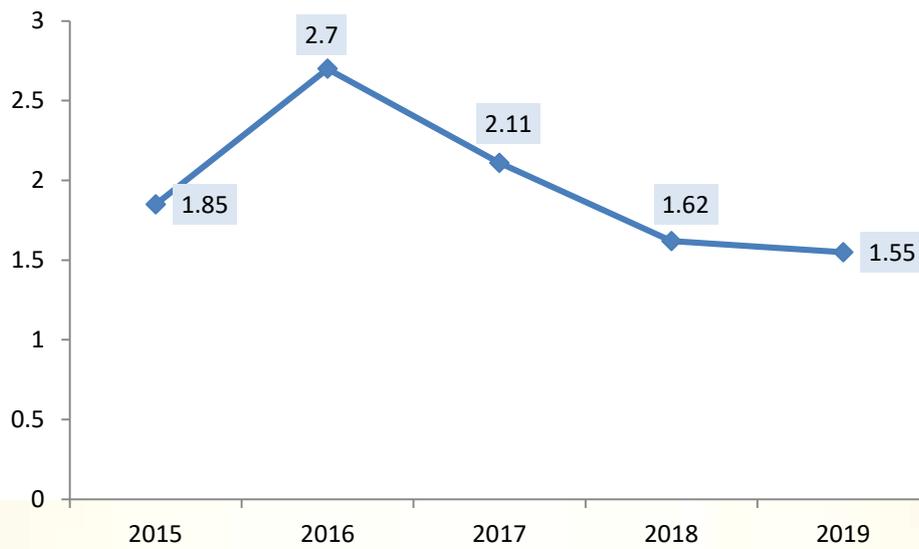
Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. Kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pencapaian sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk diukur dari indikator laju pertumbuhan penduduk dengan target dan realisasi pada tahun 2019 sebagai berikut:



Gambar 3-55 Capaian laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Jambi pada tahun 2019 adaian sebesar 1,55. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,98 atau terealisasi sebesar 127,94% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, capaian ini juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan sebesar 1,82 atau terealisasi 117,6% dengan kategori capaian sangat tinggi.





Sumber: DP3AP2 dan BPS, 2020

Gambar 3-56 Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya pertambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

Berbagai cara dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. seperti transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Prinsipnya. Pertumbuhan harus dibatasi, dan setiap lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. karena dengan pertumbuhan yang terkendali akan mempermudah pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.



Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB. Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 untuk mendukung capaian indikator ini adalah **Program Pengendalian Penduduk dan KB**. Bila dilihat dari komposisi usia penduduk, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi berada di usia produktif, dan oleh karena itu bila tidak diantisipasi maka akan terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.

Permasalahan:

1. Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

Solusi:

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik.
2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk penambahan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

3.2 Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2019 adalah sebesar 87,18% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 86,52%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dan realisasi terbesar berada pada sasaran strategis meningkatnya kapabilitas dan partisipasi



perempuan di berbagai bidang kehidupan. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK yang terlambat sehingga persiapan administrasi terlambat dan hal-hal lainnya, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap optimal. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-16 Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	213.302.164.978,00	206.761.509.884,00	96,93
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	601.413.669.149,00	499.450.336.067,00	83,05
3	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	3.838.560.000,00	3.813.160.878,00	99,34
4	Terwujudnya ketertiban umum daerah	61.720.548.600,00	57.411.985.996,00	93,02
5	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	12.710.539.398,00	12.162.205.723,00	95,69
6	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	30.892.815.310,00	27.885.411.085,00	90,27
7	Meningkatnya ketahanan pangan	16.998.724.330,00	15.619.480.909,00	91,89
8	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang	541.768.523.683,00	455.760.115.936,00	84,12



No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
	menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian			
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	3.414.385.128,00	3.247.412.747,00	95,11
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	31.893.599.415,00	28.477.713.618,00	89,29
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	10.929.065.655,00	9.806.877.686,00	89,73
12	Menurunnya angka kemiskinan	27.217.593.536,00	24.981.757.619,00	91,78
13	Menurunnya angka pengangguran	36.760.762.317,00	31.663.509.671,00	86,13
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11.164.675.116,00	10.664.264.996,00	95,51
Jumlah		1.605.270.320.699,00	1.388.930.521.217,00	86,52
Total Belanja Langsung		2.235.189.501.980,99	1.948.685.375.009,40	87,18

Sumber: Badan Keuangan Daerah (unudited, diolah), 2020

Tabel 3-17 Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	%
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	96,93	100	103,17
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	83,05	100,037	120,45



No	Sasaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	%
3	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	99,34	104,1	104,79
4	Terwujudnya ketertiban umum daerah	93,02	89,39	96,10
5	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	95,69	313,85	327,99
6	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	90,27	84,62	93,74
7	Meningkatnya ketahanan pangan	91,89	94,83	103,20
8	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	84,12	99,82	118,66
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	95,11	106,27	111,73
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	89,29	95,23	106,65
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	89,73	91,63	102,12
12	Menurunnya angka kemiskinan	91,78	110,08	119,94
13	Menurunnya angka pengangguran	86,13	101,32	117,64
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	95,51	65,31	68,38
JUMLAH		86,52	89,55	103,502

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Bila realisasi anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2019, dimana realisasi anggaran sebesar 86,52% dan capaian kinerja sebesar 89,55%, maka terlihat adanya efektivitas penggunaan anggaran pada tahun 2019.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) merupakan pengejawantahan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama, partisipasi dan komitmen seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat yang diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga target Jambi TUNTAS 2021 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung dengan upaya-upaya yang lebih baik oleh berbagai pihak.

Secara umum, sebagai pelaksanaan tahun ketiga periode RPJMD Tahun 2016-2021, kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah baik, karena 12 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, dan hanya 1 indikator dengan kriteria rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPd 2019, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi



berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal sebagai e-planning adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk) dan penilaian akuntabilitas kinerja melalui e-sakip.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. **Pertama**, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, Inovasi menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Jambi. Perubahan-perubahan kebijakan yang tiba-tiba terutama terkait dengan penghematan anggaran, menuntut adanya inovasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga kekurangan anggaran bukan lagi menjadi persoalan yang penting yang menghambat pembanguna di Provinsi Jambi.

Keempat, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.





Lampiran 1
PERNYATAAN REVIU APIP ATAS LKj





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 02 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja belum disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang *disajikan* di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 31 Maret 2020



Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198902 1 001



Lampiran 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**
Jabatan : **Plt. GUBERNUR JAMBI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PROVINSI JAMBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	76
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,3
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	21%
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.213

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	78,07%
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	94%
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	70%
		2. persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80%
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,5
	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,7%
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,2%
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,98%

Program	Anggaran
1. Program Pembangunan jalan dan jembatan	Rp.510.020.622.850,-
2. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Rp. 1.168.675.850,-
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 4.408.614.800,-
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 389.060.000,-
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 15.262.243.700,-
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 5.430.218.000,-
7. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp. 1.061.700.000,-
8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp. 313.810.000,-
9. Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Rp. 54.032.008.400,-
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 24.504.992.200,-
11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 46.193.128.100,-
12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp. 150.531.050,-
13. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rp. 1.496.207.450,-
14. Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Rp. 574.775.800,-
15. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rp. 1.321.703.800,-
16. Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Rp. 11.788.269.200,-
17. Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp. 13.068.816.450,-
18. Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 4.386.159.550,-
19. Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp. 1.083.875.250,-
20. Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Rp. 700.184.500,-
21. Program Fasilitasi, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan	Rp. 989.842.500,-
22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an	Rp. 25.201.570.000,-
23. Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Rp. 7.024.953.215,-

24.	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Rp. 3.108.017.985,-
25.	Program Pengembangan Energi	Rp. 1.839.356.000,-
26.	Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Rp. 501.346.400,-
27.	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp. 1.950.006.000,-
28.	Program Peningkatan Mutu dan keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Rp. 4.159.995.128,-
29.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Rp. 15.473.344.950,-
30.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp. 46.347.696.729,-
31.	Program Pendidikan SMA	Rp. 66.377.816.610,-
32.	Program Pendidikan SMK	Rp. 86.181.595.844,-
33.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 9.089.125.494,-
34.	Program BOSDA dan Beasiswa	Rp.270.962.148.000,-
35.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 2.059.315.600,-
36.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 677.170.000,-
37.	Program Pengawasan obat dan Makanan	Rp. 155.561.400,-
38.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.028.040.679,-
39.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 1.950.014.800,-
40.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 37.750.897.937,-
41.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 1.500.000.000,-
42.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp.110.000.000.000,-
43.	Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp. 4.037.607.948,-
44.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 516.397.400,-
45.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 2.889.831.900,-
46.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 4.269.094.627,-
47.	Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Rp. 62.073.600,-
48.	Program Kesehatan Anak Balita	Rp. 48.421.100,-
49.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp. 62.628.100,-
50.	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 427.280.600,-
51.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Rp. 272.118.700,-
52.	Program Peningkatan Balai Kesehatan	Rp. 9.425.953.755,-
53.	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp. 22.296.358.700,-
54.	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Rp. 7.392.238.024,-
55.	Program Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	Rp. 1.205.031.850,-

56.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp.	931.935.400,-
57.	Program Alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Rp.	391.948.258,-
58.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	12.001.504.171,-
59.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	1.150.000.000,-
60.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp.	900.000.000,-
61.	Program Perlindungan, Pelayanan, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp.	150.000.000,-
62.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp.	5.046.000.000,-
63.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	1.710.209.600,-
64.	Program Penanggulangan Pra Bencana	Rp.	1.120.680.000,-
65.	Program Penanggulangan Saat Bencana	Rp.	604.649.750,-
66.	Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Rp.	625.493.950,-
67.	Program Penanggulangan Pasca Bencana	Rp.	389.841.400,-
68.	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Rp.	576.312.400,-
69.	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Rp.	2.949.290.000,-
70.	Program Peningkatan Daya Saing KUMKM	Rp.	934.567.000,-
71.	Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi	Rp.	1.588.246.000,-
72.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	828.465.000,-
73.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	2.134.528.500,-
74.	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Rp.	3.853.252.000,-
75.	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Rp.	1.459.050.000,-
76.	Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	177.220.000,-
77.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	728.305.500,-
78.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Rp.	715.719.980,-
79.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Rp.	387.469.000,-
80.	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Rp.	1.705.682.901,-
81.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp.	3.034.501.135,-
82.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/	Rp.	6.692.106.258,-

Perkebunan		
83.	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan	Rp. 15.536.649.310,-
84.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	Rp. 3.563.371.000,-
85.	Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Rp. 663.041.151,-
86.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp. 5.522.790.831,-
87.	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Rp. 493.593.100,-
88.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 353.390.000,-
89.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 1.522.610.000,-
90.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp. 3.737.735.300,-
91.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Rp. 4.302.564.600,-
92.	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 4.236.877.300,-
93.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp. 2.168.970.779,-
94.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Rp. 1.656.948.528,-
95.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp. 3.803.804.743,-
96.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp. 5.383.823.597,-
97.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 9.901.598.000,-
98.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 1.200.000.000,-
99.	Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 392.079.000,-
100.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.602.388.362,-
101.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 4.024.112.693,-
102.	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 847.470.750,-
103.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 8.135.812.500,-
104.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Rp. 643.746.000,-
105.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp. 220.574.000,-
106.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Rp. 18.379.672.824,-
107.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp. 1.149.462.300,-
108.	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp. 7.654.500.000,-

109	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	Rp. 1.635.880.000,-
110	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 982.368.000,-
111	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 2.838.672.000,-
112	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 3.126.074.200,-
113	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 959.493.400,-
114	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 865.803.000,-
115	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Rp. 262.332.500,-
116	Program Kelembagaan dan Organisasi	Rp. 113.347.400,-
117	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp. 2.365.087.269,-
118	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Rp. 1.515.807.002,-
119	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 1.235.905.142,-
120	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 2.202.680.000,-
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 742.320.000,-
122	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 4.418.794.200,-
123	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 1.891.342.000,-
124	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 2.229.609.800,-
125	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Rp. 1.006.345.000,-
126	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 1.106.095.600,-
127	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 1.977.642.300,-
128	Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan	Rp. 3.447.052.000,-
129	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp. 166.350.338,-
130	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp.10.158.492.120,-
131	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Pemuda	Rp. 4.416.865.624,-
132	Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan	Rp. 697.136.292,-
133	Program peningkatan Pengembangan tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	Rp. 622.364.270,-
134	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 8.828.250.000,-
135	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 1.177.350.000,-
136	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp. 1.340.650.000,-

137	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp. 1.003.480.163,-
138	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.420.241.600,-
139	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.517.923.000,-
140	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 1.780.000.000,-
141	Program Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 2.352.464.750,-
142	Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi	Rp. 294.485.987,-
143	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka	Rp. 1.018.888.400,-
144	Program Profesionalisasi PNS	Rp. 1.384.384.640,-
145	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Rp. 503.691.300,-
146	Program peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	Rp. 332.946.700,-
147	Program Manajemen Pelayanan Kediklatan	Rp. 819.558.525,-
148	Program Sertifikasi Kompetensi dan pengembangan Kelembagaan	Rp. 1.198.361.800,-
149	Program Pengembangan Kompetensi teknis Inti	Rp. 1.300.200.000,-
150	Program pengembangan Kompetensi teknis Umum dan Fungsional	Rp. 1.487.594.500,-
151	Program Pengembangan kompetensi Manajerial	Rp. 5.057.116.975,-
152	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.992.654.650,-
153	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.085.080.650,-
154	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Rp. 578.288.000,-
155	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Rp.47.383.172.000,-
156	Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan	Rp. 531.939.650,-
157	Program Kehidupan Umat Beragama	Rp. 6.989.244.062,-
158	Program Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan serta Transmigrasi	Rp. 2.126.114.154,-
159	Program fasilitasi Bidang pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan, Keluarga berencana dan Kepemudaan	Rp. 657.718.084,-
160	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan Daerah Provinsi.	Rp. 611.660.000,-
161	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Rp. 446.710.000,-
162	Program Advokasi Hukum dan HAM	Rp. 821.500.000,-
163	Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Rp. 309.000.000,-
164	Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan Serta Otonomi Daerah	Rp. 989.924.535,-

165	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	Rp. 549.005.400,-
166	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp.12.627.091.800,-
167	Program Reformasi Birokrasi	Rp. 1.722.800.400,-
168	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama	Rp. 522.754.895,-
169	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 6.995.147.121,-
170	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur	Rp. 8.467.773.206,-
171	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 500.000.000,-
172	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp. 2.550.000.000,-
173	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 467.102.800,-
174	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Rp. 290.506.000,-
175	Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian bahan Pustaka	Rp. 794.400.000,-
176	Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	Rp. 502.000.000,-
177	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Arsip	Rp. 431.000.000,-
178	Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip	Rp. 543.400.000,-

Jambi, 2019

Pt. GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.,



Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020





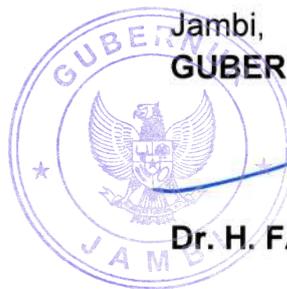
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Jambi, Januari 2020
GUBERNUR JAMBI,

[Handwritten signature]
Dr. H. FACHRORI UMAR, M. Hum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PROVINSI JAMBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,5
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,01
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	77
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,4
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	21,50%
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.215
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	78,93%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	95%
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	75%
		2. persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	84%
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65
12	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,57%
13	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,0%
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,91%

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 21,047,162,202.15
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 30,252,141,056.00
3	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Rp 13,607,683,800.00
4	Program MUTENDIK	Rp 52,548,933,000.00
5	Program Pendidikan SMA	Rp 69,220,200,000.00
6	Program Pendidikan SMK	Rp 118,896,575,000.00
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 3,721,016,320.00
8	Program BOS	Rp 300,042,365,000.00
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 1,659,597,888.00
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 608,781,000.00
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 115,666,948.00
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 632,341,274.00
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 5,456,325,830.00
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 359,776,100.00
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 3,146,505,805.00
16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 9,368,158,459.00
17	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp 35,971,030.00
18	Program kesehatan anak balita	Rp 48,409,100.00
19	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp 64,274,400.00
20	Program kesehatan ibu dan anak	Rp 364,486,300.00
21	Program upaya kesehatan perorangan	Rp 262,393,286.00
22	Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi	Rp 3,164,326,647.00
23	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp 23,011,608,318.00
24	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Rp 6,943,641,078.00
25	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Rp 810,192,450.00
26	Program Pencegahan dan Penanggulangan PTM	Rp 729,714,000.00

	Program	Anggaran
27	Program Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga (PKRT)	Rp 256,410,500.00
28	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 13,022,472,575.00
29	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 136,841,840.00
30	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Rp 2,750,942,376.00
31	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp 15,984,351,906.00
32	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp 3,171,824,080.00
33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp 125,200,000,000.00
34	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 4,565,968,417.00
35	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 160,000,000.00
36	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 91,400,000.00
37	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 2,651,810,000.00
38	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 15,500,000.00
39	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Rp 2,620,000,000.00
40	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp 1,750,809,400.00
41	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp 409,200,000.00
42	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp 17,000,000,000.00
43	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 607,166,000,673.00
44	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 20,038,988,185.00
45	Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Rp 30,951,468,170.00
46	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 17,065,366,840.00
47	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp 37,939,741,690.00
48	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rp 1,609,290,762.00

	Program		Anggaran
49	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Rp	918,309,542.00
50	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp	22,470,938,441.00
51	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp	4,461,714,715.00
52	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp	884,805,573.00
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke PU an	Rp	21,720,746,944.00
54	Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Rp	7,669,732,420.00
55	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Rp	6,185,693,628.00
56	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rp	986,273,320.00
57	Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Rp	11,250,130,701.00
58	Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Rp	800,333,275.00
59	Program Fasilitasi, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan	Rp	635,275,890.00
60	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	912,367,650.00
61	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Manjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp	780,784,240.00
62	Program pendidikan politik masyarakat	Rp	747,796,556.00
63	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	Rp	1,523,391,780.00
64	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp	3,495,209,396.00
65	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp	470,006,050.00
66	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Rp	557,796,600.00
67	Program Kelembagaan dan Organisasi	Rp	122,157,800.00

	Program		Anggaran
68	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	472,000,000.00
69	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	705,000,000.00
70	Program Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp	120,000,000.00
71	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS	Rp	6,314,764,000.00
72	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	700,000,000.00
73	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Rp	887,510,000.00
74	Program Penanggulangan Pra Bencana	Rp	1,484,078,000.00
75	Program Penanggulangan Saat Bencana	Rp	793,010,000.00
76	Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Rp	496,970,000.00
77	Program Penanggulangan Pasca Bencana	Rp	526,747,000.00
78	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp	1,485,220,026.00
79	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Rp	1,687,988,673.00
80	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	1,080,333,558.00
81	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp	807,893,000.00
82	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	1,415,118,460.00
83	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	300,000,000.00
84	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp	1,800,000,000.00
85	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	454,981,540.00
86	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	3,449,330,247.00
87	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	3,517,125,666.00
88	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	855,074,700.00

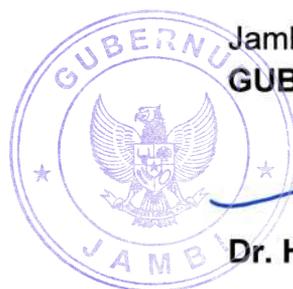
	Program		Anggaran
89	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	353,548,900.00
90	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp	2,449,936,000.00
91	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp	639,060,000.00
92	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rp	19,770,491,000.00
93	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp	2,713,020,000.00
94	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp	4,494,178,000.00
95	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp	225,628,000.00
96	Program Pembangunan dan pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp	985,500,000.00
97	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp	1,574,441,000.00
98	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Rp	615,392,000.00
99	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	297,606,384.00
100	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Rp	337,132,500.00
101	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Rp	3,265,000,000.00
102	Program Peningkatan daya Saing KUMKM	Rp	1,025,000,000.00
103	Program Peningkatan Penguataan Usaha Koperasi	Rp	1,567,000,000.00
104	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	2,188,576,117.00
105	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp	4,124,561,999.00
106	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rp	352,482,500.00
107	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp	41,781,551,363.00
108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	Rp	3,425,223,912.00

	Program		Anggaran
109	Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan	Rp	643,019,700.00
110	Program Peningkatan Pengembangan Tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan	Rp	806,355,140.00
111	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	7,822,652,441.00
112	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	868,470,408.00
113	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp	1,594,052,064.00
114	Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Rp	733,403,190.00
115	Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	Rp	460,273,260.00
116	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Arsip	Rp	305,014,593.00
117	Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip	Rp	407,903,960.00
118	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Rp	3,185,586,552.00
119	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp	1,106,927,300.00
120	Program pengembangan perikanan tangkap	Rp	3,547,730,690.00
121	Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Rp	5,543,903,108.00
122	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp	1,478,780,926.00
123	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp	4,362,977,162.00
124	Program pengembangan Kemitraan	Rp	534,216,140.00
125	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Rp	1,356,396,840.00
126	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Rp	732,393,302.00
127	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp	2,117,323,280.00
128	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp	6,055,756,712.00
129	Program peningkatan produksi peternakan	Rp	6,209,753,708.00
130	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Rp	417,713,050.00

	Program		Anggaran
131	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	270,338,000.00
132	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan	Rp	17,850,726,523.00
133	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	Rp	2,125,463,000.00
134	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp	1,286,424,000.00
135	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Rp	1,292,558,440.00
136	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp	3,056,055,103.00
137	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp	882,013,424.00
138	Program Pengembangan Energi	Rp	4,602,358,301.00
139	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp	601,732,710.00
140	Program Penyelidikan,Pembinaan,Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Rp	303,308,020.00
141	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Rp	514,855,138.00
142	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp	3,293,480,219.00
143	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp	3,293,480,219.00
144	Program pengembangan standarisasi nasional	Rp	1,043,719,300.00
145	Program peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Rp	921,961,214.00
146	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp	187,208,400.00
147	Program pengembangan industri agro dan kimia	Rp	2,774,932,260.00
148	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Rp	1,160,273,700.00
149	Program Reformasi Birokrasi	Rp	12,495,931,375.00
150	Program Kehidupan Umat Beragama	Rp	1,841,121,830.00
151	Program Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan serta Transmigrasi	Rp	77,525,884.00

	Program		Anggaran
152	Program Fasilitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Kepemudaan	Rp	4,959,974,214.00
153	Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan	Rp	1,419,206,400.00
154	Program Pembinaan, Fasilitas, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah	Rp	603,200,700.00
155	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	Rp	378,496,200.00
156	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Rp	246,531,282.00
157	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan Daerah Provinsi	Rp	1,280,539,766.00
158	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Rp	9,706,450,264.81
159	Program Advokasi Hukum dan HAM	Rp	458,396,000.00
160	Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Rp	349,935,000.00
161	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp	3,454,868,000.00
162	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama	Rp	252,322,050.00
163	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	4,165,416,524.00
164	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Rp	203,613,150.00
165	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp	10,517,954,513.80
166	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	453,063,079.00
167	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	248,892,000.00
168	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp	451,324,042.00
169	Program Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen SDM Aparatur berbasis Kompetensi	Rp	67,604,987.46

	Program		Anggaran
170	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	Rp	101,713,661.89
171	Program Profesionalisasi PNS	Rp	738,198,878.79
172	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Rp	936,365,760.73
173	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	Rp	343,441,865.15
174	Program Manajemen Layanan Pengembangan SDM	Rp	1,116,116,638.00
175	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Rp	78,000,000.00
176	Program Pengembangan Kompetensi Urusan Pemerintahan Konkuren dan Teknis Inti	Rp	930,431,453.00
177	Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Rp	1,790,067,710.00
178	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial	Rp	1,612,833,052.00
179	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp	55,250,000.00
180	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Rp	179,869,917.00
181	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Rp	1,439,839,200.00



Jambi, Januari 2020
GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. Fachrori Umar
Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.